PEMIMPIN POLITIK LOKAL

(Studi Perspektif Aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya Terhadap Kriteria Calon Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K 4-2010 012 P1
No REG : 4-2010/P1/012
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

PUPUT WAHYUDI ZP.
NIM : E34206001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PRODI POLITIK ISLAM
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Puput Wahyudi ZP** (E34206001) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing Skripsi

Drs. Slamet Mulionó M.Si.
NIP. 196811291996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Puput Wahyudi Zen Prasetiyono ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya,.....10..Agustus.....2010

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Ma'shum, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Tim Penguji :
Ketua,

Drs. Slamet Muliono, M.Si
NIP. 196811291996031003

Sekertaris,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji I,

Ainur Rofiq al Amin, S.H., M.Ag
NIP. 197206252005011007

Penguji II,

Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP. 197112071997032003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah menjawab: bagaimana pandangan Aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya dalam memandang kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2010-2015. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Dimana teknik pengumpulan data mengunakan metode interview, Observasi dan metode dokumentasi.

Setelah terkumpul, baik dari sumber data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengambarkan dan mengkomparasikan bagaimana pandangan aktivis HMI dan KAMMI daerah Surabaya dalam memandang kepemimpinan politik Surabaya.

Adapun dari hasil penelitian ini adalah persamaan pandangan antara aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya dalam memandang kriteria Walikota dan Cawalikota terletak pada cara pandang mereka dalam memahami pengertian dan tugas dari pemimpin khususnya Walikota dan Wakil Walikota yakni sebagai pelayan publik. Untuk menjadi pemimpin yang bisa melayani, maka calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2010-2015 harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas dalam memimpin bukan berdasar atas manipulasi kepemimpinan, sehingga kepemimpinan yang muncul adalah model kepemimpinan transformasional

Sedangkan perbedaan pandangan antara aktivis HMI dan KAMMI terletak pada masalah gender, aktivis KAMMI lebih berdasar kepemimpinan patriarki, sedang aktivis HMI tidak mempermasalahkan kepemimpinan berbasis patriarki atau matriraki, dan juga masalah kriteria Walikota Pasal 58-59 yang ada pada UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, aktivis HMI menginginkan adanya perubahan terutama pasal yang menyangkut pengusungan Cawali-Cawawali 15% menjadi 10% kursi di DPRD, sedangkan aktivis KAMMI tidak mempermasalahkan perubahan UU namun lebih pada implementasi yang ada di lapangan. Begitu juga dalam masalah penjaringan Calwali-Cawawali Kota Surabaya, aktivis HMI lebih cenderung melalui jalur independen dengan mekanisme penjaringan di masyarakat, sedangkan aktivis KAMMI lebih cenderung melalui konversi partai politik di internal partai dan antar partai yang bergabung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PENGHARGAAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penegasan Judul 11
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II **LANDASAN TEORI** 16

A. KEPEMIMPINAN POLITIK..... 16
1. Pengertian Kepemimpinan..... 16
2. Teori Kepemimpinan 19
3. Kepemimpinan Ideal..... 23
B. KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL 25
1. Elit Politik dan Perilaku Elit Politik..... 25
2. Pengertian Pemimpin Politik Lokal..... 29
3. Syarat-syarat calon Walikota dan Wakil Walikota dalam UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 … 31
a. Syarat calon Walikota dan Wakil Walikota dari partai atau gabungan partai..... 32
b. Syarat calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon independen..... 33

BAB III **METODE PENELITIAN**..... 36

A. Jenis Penelitian..... 36
B. Karakteristik Subjek Penelitian..... 36
C. Lokasi Penelitian..... 39
D. Fokus Penelitian..... 46
E. Sumber Data..... 46
F. Tekhnik Pengumpulan Data..... 47
G. Objektivitas dan Keabsahan Data 49
H. Motode Analisa Data..... 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV **ANALISIS** 52

A. Analisis Persamaan Pandangan Aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya tentang kriteria Walikota dan Cawalikota Surabaya 2010-2015..... 52

B. Analisis Perbedaan Pandangan Aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya tentang kriteria Walikota dan Cawalikota Surabaya 2010-2015..... 66

BAB V **PENUTUP** 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Perspektif Kepemimpinan 18

Tabel.2 persamaan Perspektif aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya terhadap Kriteria Calon Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015..... 52

Tabel.3 perbedaan Perspektif aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya terhadap Kriteria Calon Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015..... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini meneliti kriteria pemimpin politik lokal terutama calon walikota dan wakil walikota Surabaya periode 2010-2015 dalam tinjauan perspektif aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya. Dimana wacana Kepemimpinan merupakan topik yang selalu hangat di bicarakan sampai kapanpun. Hal ini bisa dilihat dalam wacana kepemimpinan politik yang berkembang saat ini. Dimana menurut penulis sedikitnya ada 5 penyebab kenapa kepemimpinan politik begitu menarik dikaji, diantaranya; pertama, kepemimpinan politik selalu berganti dalam setiap periodenya dengan ditandai dengan adanya pemilihan umum 5 tahun sekali. Kedua, proses menjadi kepemimpinan politik yang melalui seleksi dan pertarungan politik panjang yang sangat menghabiskan tenaga maupun usaha. Ketiga, masalah kepemimpinan merupakan masalah utama dalam perbaikan dan perubahan birokrasi kepemerintahan. Keempat, prasyarat dan kriteria normatif yang ada dalam UU tentang kepemimpinan politik (presiden/walikota) belum begitu sempurna dalam menyaring calon pemimpin yang ideal. Kelima, belum adanya ide-ide dan konsep yang lahir dari perspektif kaum intelektual semisal dari aktivis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergerakan mahasiswa masalah kriteria yang harus dimiliki calon pemimpin politik dalam di daerahnya.

Melihat bahwa Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan, tanggal 2 Juni 2010 disemarakkan dengan Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010-2015. Sebuah harapan besar akan munculnya Pemimpin bangsa yang baik sebagai sosok yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Karena dengan kepemimpinan yang baik, suatu bangsa dan negara dapat menghadapi berbagai rintangan dan persoalan yang akan menghadang. Masyarakat hanya akan sehat jika dipimpin oleh seorang yang berkarakter dan bermental baik yang merupakan produk budaya yang elitis. Figur pemimpin yang bersih, demokratis, adil dan tegas kiranya menjadi harapan publik dan tentunya pemimpinlah yang mempunyai sumberdaya untuk mengatur dan mengarahkan serta memperbaiki birokrasi kepemerintahan. Dengan demikian, nantinya masyarakat secara keseluruhan akan terlindungi dan tersejahterakan.

Dengan adanya pemilihan umum yang terjadi setiap 5 tahun sekali sebagai jalan suksesi kepemimpinan di era demokrasi selama ini, "pemimpin" tercipta melalui proses politik. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan Presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakilnya serta Kepala Desa dipilih melalui proses politik. Dan dalam era demokrasi ini, proses politik dalam menyaring pemimpin tentunya tidaklah tanpa cacat. Ada kemungkinan akan terjadi manipulasi kepemimpinan dimana pemimpin yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang cakap bisa saja terpilih jika punya hegemoni terhadap rakyat dan elit-elit yang bermain di dalamnya sehingga menjadi pemenang dalam kontestan pemilu.

Dan akhir-akhir ini, berita seputar masalah kepemimpinan di negara Republik Indonesia semakin menarik perhatian berkaitan dengan pesta pemilu kepala daerah yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur semisal di Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dll yang merupakan isyarat penting dalam suksesi kepemimpinan politik selama ini.

Hal ini merupakan masalah penting sebab adanya anggapan rivalitas, kewenangan dalam pengambilan keputusan dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab antara orang pertama (Presiden/kepala daerah) dengan orang kedua (wakil presiden/wakil kepala daerah) serta problematika penggantian jajaran birokrasi yang terkait posisi jabatan strategis lainnya. Problematika ini muncul dari pola dan mekanisme pemilihan dalam satu paket yang di dalamnya bisa terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur (koalisi partaipartai)[1]. Aktualitas dan signifikansi persoalan ini terjadi di daerah sesuai dengan otonomi daerah yang juga menyangkut otonomi poltik, dengan adanya pemilihan kepala daerah, karena mekanisme pemilihannya masih menggunakan sistem paket ini tentunya akan banyak sekali unsur-unsur kepentingan.

---

[1] Sam'un Jaja Raharja," Problematika Kepemimpinan Satu Paket:Dari Presiden Sampai ke Kepala Daerah "(Harian Pikiran Rakyat, 22 Juni 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diakui memang, Walaupun kriteria untuk bisa menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah tertuang dalam UU Otonomi Daerah pasal 58, namun sampai saat ini pemimpin yang kita harapkan dapat mewujudkan semua yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa di atas belum sepenuhnya terwujud dalam bingkai Negara Pancasila yang kita cintai ini. Pemimpin belum menunjukkan sikap keteladanannya pada bangsa dan negara. Demokrasi politik yang didengungkan selama ini telah menjadi pentas adu kekuatan untuk memperebutkan dan mempertahankan kedudukan dan kekuasaan tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Fenomena ini dapat dilihat dari sejumlah pemilihan kepala daerah yang melakukan penginkaran terhadap anspirasi masyarakat di daaerah. Semisal calon yang di pilih sebagian besar bukanlah calon yang secara kualitasnya dipandang baik, namun lebih karena mampi memberikan konsensi-konsensi material (money politik) kepada anggota DPRD atau juga masyarakat[2]. Begitupun hukum telah disiasati dan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga yang terjadi justru kekuasaan dan kedudukan tidak diarahkan untuk memberikan kebahagiaan dan ketentraman dalam masyarakat, tetapi kekuasaan dan kedudukan tersebut telah disalahgunakan sehingga melahirkan suatu gejolak dan keresahan yang mendarah daging.

---

[2] Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Langsung* (Surabaya :Pustaka Eureka, 2006), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betapa menyedihkan kondisi bangsa ini, dari mulai orde lama yang dipimpin oleh Sukarno hinga orde reformasi era Susilo Bambang Yudoyono sekarang ini, hasil kinerja belum mampu mereformasi birokrasi seutuhnya dari kepentingan politik maupun budaya KKN. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus semisal kasus BLBI, Century, kasus mafia perpajakan, dll. Pemimpin yang diharapkan dapat membawa kedamaian ternyata belum muncul dalam kemajemukan suku, agama dan bahasa di negara Indonesia ini. Serta yang lebih menyedihkan lagi kemajemukan suku, agama dan bahasa, ideology dll tersebut justru telah menimbulkan konflik yang cukup mengerikan. Sudah banyak korban berjatuhan akibat pertikaian SARA, solusi dan jalan damai telah sering dilakukan, akan tetapi semuanya belum bisa optimal, konflik dan pertikaian yang terjadi di Mojokerto merupakan contoh riil dimana konflik antar elit politik tetap jalan terus dimana Masing-masing pemimpin tidak siap kalah dalam pemilu dan sebagainya.

Dalam hal ini, Mahasiswa merupakan elemen yang peka melihat situasi dan kondisi tentang masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam[3].

---

[3]Hadi, "Gerakan Mahasiswa Sebagai Gerakan Pemberdayaan Dan Identitas", 13/01/2009 di *http://one.indoskripsi.com/node/7664*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran gerakan mahasiswa sebagai perpanjangan aspirasi rakyat dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi *vis a vis* penguasa. Secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya. Karena itu, dalam gerakan politik ekstraparlementernya, posisi mahasiswa paling sering menduduki posisi oportunis terhadap pemerintahatau kekuasaan. Dimana peran strategisnya adalah mengawasi diluar parlemen dan mengkritisi kebijakan pemerintahan.

Di Indonesia, sejarah pergerakan aktivis mahasiswa bukanlah perkara baru. Sejak tahun 60-an hingga kini banyak peristiwa penting yang berlaku sama ada di peringkat kebangsaan maupun antar bangsa yang melibatkan golongan mahasiswa. Penyertaan mahasiswa ini dilihat sebagai suatu yang positif menangani berbagai isu yang berlaku di dalam Negara.

Terciptanya Persatuan Aksi Mahasiswa dari berbagai elemen organisasi mahasiswa merupakan bukti bahwa mahasiswa tidak bisa dianggap remeh dalam dunia politik maupun dalam membawa aspirasi rakyat kecil dan bawah. Hal tersebut terwujud dalam proses jatuhnya rezim orde baru yang dipelopori oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa dan setiap ada permasalahan yang merugikan rakyat, mahasiswa siap untuk membela dengan berunjukrasa demi tercapainya tujuan yang adil dan sesuai dengan kontitusi. Adapun diantara sekian organisasi pergerakan mahasiswa Islam yang masih eksis sekarang adalah HMI dan KAMMI.

HMI yang didirikan oleh Lafran Pane yang sudah puluhan tahun dimulai dari tahun 5 Februari 1947 ini telah lama eksis di Surabaya dengan berdirinya HMI cabang Surabaya pada tahun 1958. Adapun dengan dibentuknya setiap cabang organisasi di daerah ini, gerak otonomi organisasi bisa berjalan dengan baik sesuai visi HMI. Begitu juga keberadaan KAMMI yang merupakan organisasi muda yang dibentuk pada masa reformasi 29 April tahun 1998 lalu telah mendirikan cabang-cabangnya di daerah. Kedua organisasi ini memiliki kesetaraan sebagai organisasi mahasiswa yang berbasis Islam yang tumbuh di kampus kampus agama maupun umum, baik negeri maupun swasta.

Melihat hal ini, HMI maupun KAMMI bagian dari agen perubahan (*Agen of Change*) harus mampu memberikan sebuah perubahan dan berperan dalam proses penentuan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dan sekaligus mampu mengkontrol sebuah perjalanan system politik yang sesuai dengan kontitusi yang berlaku. Dengan demikian peran mahasiswa dalam berpolitik sangat diperlukan demi tercapainya demokrasi dan reformasi dalam membangun sebuah negara yang adil, aman dan tentram. Mahasiswa selaku generasi kepemimpinan negara masa depan, merupakan aset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting yang paling berharga bagi sebuah negara. Hebatnya golongan mahasiswa akan menjanjikan mantapnya kepimpinan akan datang. Begitu juga sebaliknya.

Dengan melihat pandangan para aktivis organisasi Islam antara HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya ini, maka akan dapat digali ide-ide penting, sudut pandang dan anspirasi gerakan mahasiswa Islam tentang kepemimpinan politik yang mereka inginkan. Melihat bahwa format akan kepemimpinan politik oleh organisasi kedaerahan belum ada, maka sangat perlu dimunculkan sebagai wahana apresiasi gerakan mahasiswa Islam.

Adapun objek yang akan dikaji adalah pada aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya. hal ini menarik sebab belum ada tinjauan secara khusus yang membidik tentang pandangan aktivis kedaerahan yang membicarakan tentang kepemimpinan politik. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif terhadap data-data yang diperoleh, baik yang bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya juga dari buku-buku literatur yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti yang representatif .

Melihat bahwa masalah kepemimpinan politik Surabaya merupakan suatu yang penting dikaji sebab kota Surabaya merupakan kota kedua setelah Jakarta yang menjadi sentral industri dan perdagangan menjadikan kota ini cocok untuk menjadi sampel penelitian sampai kapanpun. Dimana masalah yang diangkat adalah kriteria kepemimpinan, yang bagi penulis merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah penting dan merupakan isu pertama dalam suksesi politik dalam memperbaiki administrasi dan birokrasi suatu kepemerintahan kedepan. Karena itulah maka penulis mengadakan penelitian dengan judul "PEMIMPIN POLITIK LOKAL : Studi Perspektif Aktivis HMI Cabang Surabaya Dan KAMMI Daerah Surabaya Terhadap Kriteria Calon Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya"

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa persamaan pandangan HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya tentang kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode 2010-2015?
2. Apa perbedaan pandangan HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya tentang kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode 2010-2015?

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah dan agar lebih spesifik pembahasan skripsi ini, maka diperlukan pembatasan masalah dimana objek kajian penelitian ini adalah membahas seputar tentang: sikap dan pandangan dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi mahasiswa Islam yakni HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya dalam memandang persoalan Kepemimpinan Politik. Terutama yang dibahas adalah kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015.

D. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan mampu:

1. Bagaimana cara pandang aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah surabaya tentang kriteria calon Walikota dan Wakil walikota Surabaya Periode 2010-2015
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya tentang kriteria calon Walikota dan Wakil walikota Surabaya Periode 2010-2015

E. Manfaat Penelitian

Pertama, manfaat dan kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana politik kedaerahan terutama tentang organisasi kemahasiswaan Islam.

Kedua, dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu mengambarkan dengan jelas bagaimana sikap dan pandangan aktivis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya dalam memandang kepemimpinan politik terutma dalam lingkup kota Surabaya.

Ketiga, manfaat penelitian ini guna menggali ide-ide reformis para aktivis organisasi mahasiswa Islam sebagai gerakan intelektual ekstraparlementer dalam memberikan pandangan kriteria kepemimpinan kota Surabaya sehingga bisa menjadi rujukan dalam menganalisis calon yang akan maju dalam kepemimpinan kota Surabaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

F. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul "Kepemimpinan Politik : studi perbandingan perspektif HMI Cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya", maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dam konteks kebahasaan.

Kepemimpinan politik pemimpin yang di diperoleh dari proses politik dimana memiliki kewenangan dan kemampuan mempengaruhi, memotivasi aneka sumber daya yang ada secara politis[4] dimana yang dimaksud di sini adalah walikota dan wakil walikota.

[4] Akbar Tanjung, *Kepemimpinan Politik yang Negarawan* (sekertariat Negara Republik Indonesia) *di www.setneg.go.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspektif	sudut pandang tertentu guna menjelaskan sesuatu objek.
HMI	Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Merupakan organisasi mahasiswa Islam pertama yang didirikan oleh Lafran Pane pada tahun tahun 5 Februari 1947
KAMMI	Singkatan dari kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia. Didirikan pada awal reformasi 29 Maret 1998.
Surabaya	Kota Metropolitan yang merupakan ibukota dari Jawa Timur dan merupakan daerah yang akan di teliti.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan proposal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penyajian data dilakukan tidak dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif serta dari sisi *metodelogis*, tata cara mengungkapkan pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.[5]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan yakni termasuk dalam penelitian empirik karena data yang digunakan adalah berasal dari data wawancara, observasi dan dari sumber penelitian yang relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, digunakan dokumentasi dimana dalam pelaksanaannya, penulis berusaha mencari dokumen serta literatur yang mendukung seperti artikel, buku, catatan tertulis lainnya dan tidak lupa mengawasi langsung implementasi dilapangan serta wawancara berbagai narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

4. Sumber data

Sumber data yang diambil adalah dari data-data berupa dokumen maupun buku-buku yang terkait dengan sikap dan pandangan aktivis HMI mapupun KAMMI daerah Surabaya dalam hal kepemimpinan politik, juga wawancara dari beberapa narasumber dari instruktur atau pengurus

[5] Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi HMI dan KAMMI yang dalam kriterianya diantaranya sebagai berikut:

- Pengurus Internal organisasi
- Memiliki peran strategis dalam organisasi yang terkait dengan penelitian.
- Mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang yang diteliti.

5. Analisis

Data yang sudah didapat Selanjutnya diedit ulang dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Setelah itu dianalisis dengan teori sosial yang digunakan sehingga dapat digambarkan secara rapi dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian kedua merupakan kerangka teori dengan judul Kepemimpinan Politik Kerangka teori ini, terdiri dari: pengertian kepemimpinan, pengertian politik dan elit politik, serta pengertian pemimpin politik lokal. Kerangka teori ini merupakan landasan berfikir sekaligus sebagai alat analisis (*tools of analysis*) dalam memaparkan obyek yang diteliti.

Pada bagian ketiga metodologi penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian. Bagian ini disajikan tentang jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Pada bagian keempat merupakan paparan analisis perbedaan dan persamaan pandangan aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya dalam memandang masalah kepemimpinan politik (Walikota dan Wakil Walikota Surabaya)

Bagian kelima memuat penutup di bagian ini disampaikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas peryaan pada bab pertama yang dianalisis pada bab ke dua dan ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KEPEMIMPINAN POLITIK

1. Pengertian Kepemimpinan

Sebagai makhluk social, yang saling membutuhkan, manusia memerlukan komunikasi dan koordinasi dalam setiap kehidupan bersamanya, kegiatan manusia selalu membutuhkan kepemimpinan. Karena begitu pentingnya keberadaan pemimpin menjadikan Kepemimpinan selalu mengiringi kehidupan manusia dalam pemenuhan dan keperluannya. Oleh Karena itu, sebelum menjelaskan pengertian kepemimpinan politik maka perlu dijelaskan pengertian kepemimpinan terlebih dahulu.

Pada dasarnya kepemimpinan (leadership) berasal dari kata "pemimpin" (leader) yang dalam istilah lain, semakna dengan "atasan","kepala", atau disebut "manager" serta "pejabat"[1] dimana dalam pengertian ini, menjelaskan bahwa pemimpin adalah merupakan jabatan paling atas dalam structural yang mempunyai fungsi dan peran sangat penting dalam membawa sebuah organisasi baik organisasi bersekala kecil seperti Ormas, perusahaan, dll atau bahkan organisasi bersekala besar seperti Negara.

[1] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Public, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: Refika Aditama,2009), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hendri Pratt Fairchild kepemimpinan diartikan sebagai orang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah lalu social dengan mengatur dan mengarahkan, mengkoordinisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi (jabatan)[2]

Menurut Akbar Tanjung[3], pemimpin adalah sosok yang, dengan segenap potensi dan kewenangan yang ada, mampu mampu memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk secara sadar dan sukarela berpartisipasi di dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang guna mempengaruhi, memotivasi, dan mengaktivasi aneka potensi dan sumber daya yang ada, sehingga organisasi yang dipimpinnya mampu berjalan secara efektif dalam rangka mengupayakan perwujudan tujuan-tujuannya.

Menurut Prof. Dr. Sedarmayanti MPd. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain berubah/tetap menjadi integratif[4].

Alfan Alfian[5] mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses dimana seseorang punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk

---

[2] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 32
[3] Akbar Tanjung, *Kepemimpinan Politik Yang Negarawan* (www.sesneg.go.id)
[4] Sedarmayanti, *Reformasi administrasi..*, 121
[5] M. Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerakkan individu lain meraih tujuan bersama. Alfan meringkas beberapa definisi ahli kepemimpinan dalam 5 pesrpektif, diantaranya:

Tabel 1. Perspektif kepemimpinan

Perspektif	Pegertian
Focus of group proces	Pemimpin merupakan pusat segala aktivitas dan perubahan kelompok. Kepemimpinan adalah pusat kehendak yang mengerakkkan aneka aktivitas, perubahan dan perkembangan kelompok(organisasi)
Personality	Pemimpin merupakan perpaduan bakat khusus antara bakat khusus (special traits) dan karakterisitik individu, yang mendelegasikan tugas pada orang lain secara sempurna
Art atau behavior	Merupakan seperangkat tindakan dan perilaku tertentu yang mampu mengerakkan perubahan dalam organisasi
Power relationship	Kepemimpinan adalah relasi antara pemimpin (leadership) dan yang dipimpin (follower)
Instrument of goal achievement	Kepemimpinan adalah upaya membimbing anggota mencapai tujuan bersama
Skill perspective	Kepemimpinan adalah kapabilitas yang membuatnya bekerja secara efektif

Dari pengertian para ilmuwan ini dapat ditarik pemahaman bahwa kepemimpinan adalah berhubungan dengan proses mempengaruhi dari seseorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna mencapai tujuan organisasi dimana terdapat seni mengatur, mengelola dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama, semangat, dan potensi potensi yang ada guna mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Dalam beberapa literatur, para ahli membedakan istilah tentang kepemimpinan dimana kepemimpinan terdiri dalam 2 hal yakni kepemimpinan yang bersifat formal dan kepemimpinan yang bersifat non formal. Dimana pemimpin formal[6] ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagi pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam suatu struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya guna mencapai suatu sasaran organisasi.

Sedangkan pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Oleh karena itu, objek kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan formal dengan mengecualikan kepemimpinan informal. Terutama studi yang dibahas adalah criteria kepemimpinan politik kepala daerah.

2. Teori Kepemimpinan

Sejarah lahirnya pemimpin tidak lepas dari fungsi akan kepemimpinan. Ia muncul bersama peradapan manusia sejak zaman Nabi-

[6] Kartini Hartono, *ibid.*, 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi dan nenek moyang yang terjadi kerjasama antar manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Kepemimpinan diperlukan dalam menjaga keatuan dan kesatuan para angotanya dalam mengatur maupun menghadapi pengaruh luar maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dengan ringkasnya, pemimpin dan kepemimpinan dimanapun dan kapanpun selalu diperlukan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun dari berbagai teori yang membahas tentang kepemimpinan, ada 3 teori tentang asal mula atau lahirnya pemimpin[7] diantaranya:

1. Teori genetic (*genetic theory*), yakni pemimpin lahir karena mewarisi bakat yang diturunkan orang tua atau leluhur.
2. Teori social (*traits theory*), yakni pemimpin bukan diwariskan tetapi diciptakan dan dibentuk.
3. Teori ekologi (*behavioral theory*), yakni pemimpin diciptakan oleh lingkungannya.

Menurut French dan Raven[8] (1996:102), kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin dapat bersumber dari:

1) *Reward power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan, bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya.

---

[7] Sedarmayanti, *Ibid.* 126., idem lihat juga di Kartini Hartono, *Ibid.* 29

[8] French dan Raven, "Pemimpin Transformasional, Pemimpin Transaksional, dan Dorongan Inovasi" (Jurnal psikologi, 1996), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Coercive power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpinnya

3) *Legitimate power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya.

4) *Referent power*, yang didasarkan atas identifikasi (pengenalan) bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya atau karismanya.

5) *Expert power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seeorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi

Dalam teori kepemimpinan di kenal 5 teori kepemimpinan[9], diantaranya:

1. Teori kepemimpinan karakteristik bawaan (*trait theories of leadership*), yakni pendekatan yang mengansumsikan pemimpin memiliki ciri fundamental yang berbeda dengan pengikut. Titik poin teori ini menekankan pada karakteristik seorang pemimpin yang mengidentifikasikan bahwa seorang pemimpin memiliki

[9] *Ibid.*, 126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan yang memungkinkan mendapatkan tanggungjawab kepmimpinan karena memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain.

2. Teori kepemimpinan situasional (*Contingency Theory of leadership*), yakni pendekatan yang mengansumsikan bahwa kepemimpinan pada situasi tertentu tidaklah paten, namun diperlukan kepemimpinan yang berbeda dari situasi yang berbeda karena setiap masa diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda sehingga menghasilkan efek berbeda dari situasi yang juga berbeda.

3. Teori kepemimpinan transaksional (*Transactional Theory of Leadership*) yakni teori yang memandang bahwa kepemimpinan dipandang lebih dalam kaitanya dengan perilaku pemimpin dan bagaimana perilaku mempengaruhi dan dipengaruhi kelompok pengikut. Dalam hal ini, antara pemimpin dan yang dipimpin terjadi transaksi atau pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan.

4. Teori kepemimpinan karismatik, yakni teori yang dimiliki pemimpin yang bukan karena tradisi ataupun kewengan tetapi karena memperoleh kekuatan supernatural Tuhan. Kepemimpinan kharismatik bukan sekedar keyakinan terhadap kepercayaan, tetapi memiliki kemampuan daya tarik tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membuat bawahan menjadi percaya dan hormat serta menjadi sebuah idola dan pujaan sebagai figure spiritual.

5. Teori kepemimpinan transformasional, yakni teori kepemimpinan yang menitik beratkan pada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap segala hal (reformis) yang melekat dan tertanam dalam organisasi melalui penyempurnaan dan penciptaan visi dan misi yang jelas dan tegas serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut. Kepemimpinan tansformasional merupakan gambaran pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan.

3. Kepemimpinan Ideal

Dalam kepustakaan ilmu politik[10], diuraikan tentang sifat-sifat ideal seseorang pemimpin, dilukiskan oleh Herman Finner sebagai berikut:

Kesadaran, berarti bahwa seseorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta yakni pengetahuan yang dibutuhkan agar mampu menjalankan jabatannya.

Kebulatan pandangan, adalah bersifat esensial bahwa seseorang pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang pengatahuan yang terpenting bagi kedudukannya.

[10] Kamal Muasik, *Budaya Politik Kampus; Studi terhadap aktivis mahasiswa dilingkungan universitas negeri semarang*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2005), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketetapan jiwa, dari seseorang pemimpin kita mengharapkan adanya ketetapan jiwa emosi, kelakuan, sikap dimana dia akan selalu menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan, dan dia akan selalu mampu menggunakan pikiranya secara tepat dalam setiap permasalahan yang muncul.

Keyakinan, artinya seseorang pemimpin mempunyai ide-ide, imajinasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prinsip-prinsip, mempunyai pola pandangan yang positif dan kontruktif tentang masyarakat yang baik di dalam daya cipta yang diperjuangkan dengan gigih dan berketetapan.

Kekreatifan, Artinya kemampuan dari seseorang pemimpin untuk menemukan hal-hal yang baru dan menerapkan kebijaksanaanya dalam situasi tertentu, menciptakan segala keyakinannya dalam kenyataan, memikirkan jauh hari kedepan: karenanya pengatahuan, ketetapannya, kebulatan pandangannya, keyakinan akan diterapkan terhadap berbagai situasi yang belum pernah terjadi, tetapi telah terduga dan teramal sebelumnya.

Kepekaan hati nurani, artinya seseorang pemimpin terpanggil oleh hati nurani dan oleh rasa tanggung jawabnya atas segala kualitas yang telah terurai di atas dan malah hal-hal lainya yang harus diperinci lebih lanjut.

Keberanian, artinya dia mungkin mempunyai musuh-musuh dan menderita oleh segala bentuk ketidak beruntungan. Tetapi seseorang pemimpin dengan hakekat kepemimpinannya harus menaggung resiko dan tidak menyerah pada perasaan atau kepentingan subjektifnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemampuan memukau, kualitas yang dinamakan "daya pikat' atau kekuatan menawan hati rakyat melalui gaya pidato, pemunculan yang tepat atau korek dan anjuran tindakan untuk melakukan sesuatu.

Kepandaian, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang banyak untuk bekerjasama guna suatu tujuan yang dijadikan keinginan mereka.

B. KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL

1. Elite Politik dan Perilaku Elite Politik

Politik berasal dari bahasa Inggris yakni *politics* yang bermuasal dari Yunani yakni *politicos* (suatu hal tentang warga negara) *polities* (seorang warga negara), *polis* (kota. Negara), *politea* (kewargaan). Politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan[11].

Menurut Miriam Budiharjo[12], secara umum, politik diartikan sebagai kegiatan dalam sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan bersama dan melaksanakan tujuan itu. Untuk menentukan dan melaksanakan tujuan itu diperlukan pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentu kebijakan-kebijakan umum (*public polices*) yang di dalamnya diatur pembagian (*distribution*) dari sumber-sumber (kekuasaan) yang ada. Adapun untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan

[11] Fajlurrahman Jurdi, *Alb Politik Islam* (Jogyakarta: Antonylib, 2009), 1
[12] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 32-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*authority*) yang akan dipakai baik untuk membangun kerjasama maupun untuk menyelsesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai bisa dalam bentuk meyakinkan (persuasi), dan kalau perlu paksaaan (*coercion*). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat dan bukan tujuan pribadi seorang.

Melihat dari pengertian ini, untuk mewujudkan proses politik, Politik memerlukan aksi, dimana aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik. Dimana aksi politik sendiri merupakan konsekuensi dari menjalankan teori-teori politik. Salah satu aksi dalam politik adalah kegiatan dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana yang dikutip oleh Mirriam Budiarjo yang mengutip pendapatnya Karl W. Deuts[13], bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum yang pengambilan keputusan itu berbeda dengan keputusan pribadi atau golongan. Disini ada wilayah pembeda antara "kepentingan pribadi" dan "kepentingan umum" sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil adalah mengarah ke sektor publik dari suatu Negara. Oleh karena itulah oleh Deuts, Negara dianggap sebagai kapal sedangkan pemerintah bertindak sebagai Nahkodanya.

Ketika politik berkutat pada masalah kekuasaan lahirlah elit-elit yang lahir karena stratifikasi politik. Dalam istilah politik, elite merupakan

[13] Mirriam Budiarjo, *Ibid.*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok terkecil dalam masyarakat yang memegang posisi tertentu, baik elite pemerintahan, elit agama, elite adat maupun elite ekonomi[14].

Elit berdasarkan kajian teoritis yang dibangun awal-awalnya oleh Mosca dalam The Rulling Class, Pareto, dan Michels mempunyai beberapa prinsip-prinsip umum yaitu pertama, adanya kekuasaan politik, kedua secara umum masyarakat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yang berkuasa dan yang dikuasai, ketiga elit bersifat homogen, bersatu, dan meliki kesadaran kelompok, keempat elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan kelima elit besifat otonom .

Pengertian elit memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai persfektif, ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasan maka memunculkan dua tipe yaitu elit yang memerintah secara formal dan elit yang tidak memerintah secara formal. Misalnya Raymond Aron, yang menaruh perhatian pada kelompok kecil yang memerintah, dan keterhubungannnya dengan kelas-kelas sosial. Temuan Raymond bahwa adanya kemajemukan kelompok-kelompok elit dalam masyarakat modern[15].

Lebih lengkapnya dalam menjelaskan pengertian elit, menurut Nazaruddin Syamsudin[16] elite politik diartikan sebagai tokoh-tokoh puncak diantara para pelaku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan politik

---

[14] Fajlurrahman Jurdi, *Ibid.*, 41

[15] Abdul kholiq, "Peranan elite politik Lokal dalam mewujudkan demokratisasi di daerah pasca Reformasi" (Senin, 01 Maret 2010) *di http://blog.unsri.ac.id/revolusi_jalanan/artikel-politik-dan-kebijakan/peranan-elit-lokal-dalam-mewujudkan-demokratisasi-di-daerah-pasca-reformasi/mrdetail/6615/*

[16] Nazaruddin Syamsudin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1993), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau semua elite yang ikut serta dalam mempengaruhi proses politik dan memformulasikan kepentingan-kepentinganya.

Dalam mengambarkan tipologi perilaku politik[17], dapat dijelaskan melalui sudut pandang psikologi dimana terdapat 3 tipe yakni tipologi otoriter dimana elit politik suka memerintah dengan kebijakan yang memaksakan kehendak. Kedua tipe politik machievelli yakni perilaku elit politik yang terkesan licik, menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Dan yang ketiga tipe demokratik yakni tipe perilaku politik yang meraknyat dan mementingkan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Sedangkan dalam tipologi partisipasi politik masyarakat[18], dibedakan menjadi 2 kategori yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi *input* dan *output* politik sehingga ia aktif dalam mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengkritisi dan memberikan perbaikan pada kepemerintahan serta aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang hanya berorientasi pada *output* saja, sehingga kegiatanya tidak mementingkan proses partisipasi dan pengkritisan dalam pembuatan kebijakan sehingga yang terjadi adalah yang penting hasil bukan proses. Hal ini cocok untuk mengambarkan masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

---

[17] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT Grasindo, 2010), 169
[18] *Ibid.*, 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Pemimpin Politik Local

Latar belakang munculnya kepemimpinan politik lokal adalah sejak munculnya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberi wewenang untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri. Di samping itu, Undang-undang juga menegaskan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan mengunakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sera memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah[19]. hal ini juga sangat penting dipahami dari UU tersebut, bahwa kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah bersifat utuh dan bulat dalam penyelengaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian sampai dengan evaluasi termasuk pemilihan kepada daerah/walikota.

Kepala daerah sebagai manifesto kepemimpinan politik merupakan hal yang pasti, sebab kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui mekanisme politik yakni pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerahnya. Hal ini mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 24 ayat 5 yang menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya[20], mempunyai arti penting terhadap proses pergolakan demokrasi di daerah. Terutama pada masalah perebutan kursi jabatan

---

[19]Mashuri Mascab, *Persoalan Otonomi Daerah: Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Era Otonomisasi Yang Luas-Nyata Dan Bertanggungjawab* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2006), 175

[20] UU Otonomi Daerah (Bandung: Focus Media, 2006), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala dan wakil kepala daerah. Perebutan ini menjadi perhatian public dimana banyak dari golongan maupun elite partai dapat bersaing memperebutkan jabatan "pemimpin politik" ini melaui pemilu.

Kepala daerah atau wali kota sebagai aktor utama pemimpin politik local merupakan penentu keberasilan penyelengaraan kepemerintahan di daerah. Terlepas terpilih berasal dari proses politik atau dari independent, maka kewajiban menjalankan kepemerintahan dengan lebih dinamis, adil, merata dan sejahtera merupakan kewajiban yang lebih utama di dahulukan daripada kepentingan politik pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alfan Alfian bahwa ketika seorang politikus telah sampai jabatannya menjadi pemimpin public yang mengelola negara, maka selesai sudah kepentingan politiknya[21].

Secara teoritis, kepemimpinan politik merupakan gabungan antara unsur kepimpinan dan politik, dimana Politik berkaitan tentang upaya meraih, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam melihat kepemimpinan politik ini, Andrew Heywood menjelaskan bahwa ada 3 perspektif dalam memahami kepemimpinan politik, diantaranya: (1) kepemimpinan sebagai pola perilaku; (2) kepemimpinan sebagai kualitas personal; (3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan, kata kuncinya adalah mempengaruhi. Sebagai kualitas personal, kepemimpinan berkaitan

[21] Alfan Alfian, *Ibid.* 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kharisma dimana dengan kharisma dapat menjadi daya tarik seorang pemimpin disegani. Sedangkan sebagai nilai politik, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan untuk mengerakkan orang lain dengan otoritas moral atau pandangan ideologis[22].

3. Syarat-syarat calon pemimpin calon walikota dan wakil walikota dalam UU otonomi daerah No. 32 tahun 2004

Tentang masalah kepemimpinan politik ini, di dalam UU Otonomi Daerah[23] di sebutkan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pasangan calon di ajukan adalah dari partai politik atau gabungan partai politik. Dimana partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarakan pasangan calon apabila memenuhi syarat perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan. Tidak Cuma itu, partai politik harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam menyaring dan menetapkan pemimpin untuk maju dalam pencalonan menjadi walikota atau wakil walikota.

---

[22]Alfan Alfian, ibid. 191. mengutip dari bukunya Andrew Heywood, *"Key Consepts in Politic"*, 2000

[23] UU Otoda, *Ibid.*, Pasal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat calon walikota dan wakil wali kota dari partai politik atau gabungan partai politik

Dalam UU Otonomi Daerah pasal 58 secara jelas disebutkan syarat-syarat untuk bisa lolos menjadi calon walikota dan wakil walikota dari partai politik atau gabungan partai politik diantaranya:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia terhadap Pancasila sebagai dasar Negara, UUD tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani berdasar hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palinglama 5 tahun atau lebih;
g. Sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tidak sedang memiliki tanggung jawab utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pegadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan
p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

b. Syarat-syarat calon Walikota dan Wakil Walikota dari independen

Selain itu untuk calon perorangan (independen), selain persyaratan sesuai pasal 58 dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, KPUD Surabaya[24] memberikan ketentuan diantaranya:

a. Menyerahkan surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh

[24]Pengumuman KPU Nomor :29 /KPU-Kota-014.329945/II/2010 tentang Pendaftaran/Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan disetujui oleh bakal pasangan calon, diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1-PKWK-KPU;

b. Fotocopy KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnnya yang sah dikeluarkan sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung;

c. Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf b) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP;

d. Tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimaksud dibendel tiap-tiap Kelurahan dan diserahkan kepada KPU Kota Surabaya dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing rangkap 3 (tiga);

e. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimaksud berisi :

   a. Nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan;

   b. Rekapitulasi jumlah dukungan tingkat Kota dan kecamatan;

   c. Nama Kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah persyaratan minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimaksud sebagaimana Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 adalah 3% dari jumlah agregat penduduk Kota Surabaya 2.936.326 orang/jiwa, yaitu sebesar 88.090 orang/dukungan yang tersebar lebih dari 50 % kecamatan di Kota Surabaya.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *(paradigma naturalistik)* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analisis Deskriptif* dan *Analisis Komparatif*, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan dan membandingkan secara mendalam tentang variabel tertentu.

B. Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aktivis mahasiswa HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya pada kriteria calon walikota dan walikota Sarabaya. Dalam menentukan subyek penelitian mendasarkan pada karakteristik system dimana ada keterkaitan antara lembaga organisasi dengan para aktivis di dalamnya. Untuk itu subjek penelitian ini berdasar pada elite yang ada pada organisasi HMI dan KAMMI, dimana peneliti mengambil masing-masing 3 aktivis dari HMI cabang Surabaya maupun KAMMI daerah Surabaya.

1. Profil Narasumber dari HMI cabang Surabaya

   a. Nurkholis

      Nurkholis adalah ketua umum HMI cabang Surabaya periode 2009-2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua korkom HMI IAIN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode 2008-2009. Beliau akrab dipanggil Kholis dimana masih kuliah semester akhir (sem. XIV) DI fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist. Merupakan orang asli Madura. Dia adalah orang yang santun dan ramah serta sedikit pendiam serta optimis, dan penuh semangat dalam menjalankan amanah yang cukup berat membawa gerbong organisasi.

b. Badri al Amin

Badri al Amin adalah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di fakultas dakwah semester XIV. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Badri, Di HMI Cabang Surabaya, beliau menjabat sebagai anggota departemen Pelayanan Umat. Sehari-hari orang yang gemar membaca buku-buku filsafat dan politik ini, sambil sibuk berorganisasi di HMI juga bekerja menunggu warnet yang tidak jauh dari Universitasnya. Beliau adalah asli orang Madura.

c. Aridlo Pamungkas

Aridlo Pamungkas yang biasa dipanggil Ridlo adalah sarjana social lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya juruan politik Islam. Ia berpengalaman dan menguasai teori-teori politik bahkan hingga kondisi wacana politik Surabaya. Pengalamanya diorganisasi Ia tekuni sejak dari MAN hingga sekarang. Di HMI Cabang Surabaya Ia menjabat sebagai wakil bendahara umum. Ia merupakan orang Ngawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profil Narasumber dari KAMMI Daerah Surabaya

a. Agus Kusdianto

Nama pangilannya biasa di panggil Agus, walau orangnya tidak seberapa besar, namun di KAMMI ia menjabat sebagai ketua Umum periode 2009-2010. Yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai ketua KAMMI komisariat IAIN tahun 2007-2008. Beliau merupakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Tadris Bahasa Inggris semester X. orang asli pondok ini berasal dari Jepara. Sebagai ketua ia tidak pernah pantang menyerah mengerakkan organisasi KAMMI ini selama ini.

b. Muhammad Faiz Khudlori

Beliau biasa dipanggil Faiz, merupakan orang Madura alumni pondok al Amin Prenduan Madura yang sudah mengkhatamkan hafalan 30 Juz, sampai sekarang, masih menjadi mahasiswa UNAIR jurusan biologi semester VIII. Aktivitasnya berorganisasi sangat kental. Selain menjabat kepengurusan di KAMMI sebagai ketua departemen kebijakan Publik yang menjadi tempatnya keilmuan dan politik maupun aksi, beliau juga pernah menjadi ketua BEM-F Unair.

c. Mohammad Faizin Adi Permana

Beliau biasa dipanggil Adi atau Faizin adalah asli orang jember, merupakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya fakultas Syar'ah Jurusan Muamalah semester VIII yang lagi menyelesaikan tugas akhir. Di KAMMI ia mendapatkan amanah sebagai anggota Humas atau hubungan masyarakat yang bertugas membuat jaringan baik di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun di luar yang sebelumnya pernah menjadi Kebijakan Publik dan ketua humas Komisariat KAMMI IAIN. Beliau sangat mengemari buku buku Islam dan barat dan suka mengkritisi pemerintah melalui FB.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya. Pengambilan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Surabaya merupakan barometer dalam partisipasi politik masyarakat Jawatimur, mengingat Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan tidaklah wajar bila kemudian kemajuan kota berbanding terbalik dengan tingkat dan kualitas partisipasi politik masyarakatnya, terlebih lagi keberadaan organisasi mahasiswa Islam yang telah mapan.

1. Profil Kota Surabaya

   a. Kondisi geografis[1]

   Letak : 07° 9"- 07° 21" Lintang Selatan dan 112° 36" - 112° 54" Bujur Timur

   Ketinggian : 3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut

   Batas Wilayah:

   Sebelah Utara : Selat Madura

   Sebelah Timur : Selat Madura

[1] Situs resmi Pemerintah Kota Surabaya *di www.surabaya.go.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Luas Wilayah : 52.087 Ha dengan 63,45 persen atau 33,048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36.55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Jumlah Kecamatan : 31

Surabaya Pusat
- Tegalsari
- Simokerto
- Genteng
- Bubutan

Surabaya Timur
- Gubeng
- Gunung Anyar
- Sukolilo
- Tambaksari
- Mulyorejo
- Rungkut
- Tenggilis Mejoyo

Surabaya Barat
- Benowo
- Pakal
- Asem Rowo
- Sukomanunggal
- Tandes
- Sambikerep
- Lakarsantri

Surabaya Utara
- Bulak
- Kenjeran
- Semampir
- Pabean Cantikan
- Krembangan

Surabaya Selatan
- Wonokromo
- Wonocolo
- Wiyung
- Karang Pilang
- Jambangan
- Gayungan
- Dukuh Pakis
- Sawahan

Jumlah Desa /Kelurahan : 163

Kelembapan Udara : rata-rata minimum 42% dan maksimum 96%

Tekanan Udara : rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan maksimum 1.014,41 Mbs

Temperatur : rata-rata minimum 23,3 °C dan maksimum 35,2 °C

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musim kemarau : Mei – Oktober

Musim hujan : Nopember – April

Curah Hujan : rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember s/d Mei

Kecepatan Angin : rata-rata 7,0 Knot dan maksimum 26,3 Knot

Arah Angin Terbanyak

Januari	: Barat-Barat Laut	Juli	: Timur
Februari	: Barat Laut	Agustus	: Timur
Maret	: Barat	September	: Timur
April	: Timur	Oktober	: Timur
Mei	: Timur	Nopember	: Timur
Juni	: Timur	Desember	: Timur

Penguapan Panci Terbuka : rata-rata 165,2

Struktur Tanah : Terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi

Topografi : 80% dataran rendah, ketinggian 3-6m, kemiringan <3%, 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30m dan kemiringan 5-15%

Dalam sejarah, Nama Surabaya muncul semasa awal pertumbuhan kerajaan Majapahit. Nama Surabaya diambil dari simbol ikan Sura dan Buaya. Simbol itu sesungguhnya untuk menggambarkan peristiwa heroik yang terjadi di kawasan Ujung Galuh (nama daerah Surabaya di masa silam), yakni pertempuran antara tentara yang dipimpin Raden Widjaja dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasukan tentara Tar Tar pada tanggal 31 Mei 1293. Tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Surabaya.

Awalnya Surabaya adalah kawasan perkampungan atau pedesaan di pinggiran sungai. Nama-nama kampung yang kini masih ada seperti Kaliasin, Kaliwaron, Kalidami, Ketabangkali, Kalikepiting, Darmokali, dan sebagainya adalah bukti yang menjelaskan bahwa kawasan Surabaya adalah kawasan yang memiliki banyak aliran air / sungai. Secara geografis ini sangat masuk akal, karena memang kawasan Surabaya merupakan kawasan yang berada di dekat laut dan aliran sungai besar (Brantas, dengan anak kalinya).

Lokasi Surabaya yang berada di pinggir pantai, merupakan wilayah yang menjadi lintasan hilir mudik manusia dari berbagai wilayah. Surabaya, menjadi pertemuan antara orang pedalaman pulau Jawa dengan orang dari luar. Pada tahun 1612 Surabaya sudah merupakan bandar perdagangan yang ramai. Peranan Surabaya sebagai kota pelabuhan sangat penting sejak lama. Saat itu sungai Kalimas merupakan sungai yang dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menuju pelosok Surabaya.

Banyak pedagang Portugis membeli rempah-rempah dari pedagang pribumi. Di bawah kekuasaan Trunojoyo, Surabaya menjadi pelabuhan transit dan tempat penimbunan barang-barang dari daerah subur, yaitu delta Brantas. Sementara, Kalimas menjadi "sungai emas" yang membawa barang-barang berharga dari pedalaman.

Kota Surabaya juga sangat berkaitan dengan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak penjajahan Belanda maupun Jepang, rakyat Surabaya (Arek Suroboyo) bertempur habis-habisan untuk merebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan. Puncaknya pada tanggal 10 Nopember 1945, Arek Suroboyo berhasil menduduki Hotel Oranye (sekarang Hotel Mojopahit) yang saat itu menjadi simbol kolonialisme. Karena kegigihannya itu, maka setiap Tanggal 10 Nopember, Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Hingga saat ini bekas-bekas masa penjajahan terlihat dengan masih cukup banyaknya bangunan kuno bersejarah di sini.

b. Kondisi Politik

Berdasarkan catatan sejarah, Surabaya sejak zaman kolonial hingga kini sudah memiliki 27 Walikota

Nama Walikota Surabaya dari Tahun 1916 Sampai Sekarang itu diantaranya:

1. Mr. A. Meyroos Burgermeester 1916 – 1920
2. Ir. G. J. Dijkermen Burgermeester 1920 – 1926
3. H. J. Bussemaker Burgermeester 1926 –
4. Ter Poorten Burgermeester
5. MHW Van Helsdingen Burgermeester - 1942
6. Mr. W. A. H. Fuchter Burgermeester 1942 (Jan-Feb)
7. Radjamin Nasution Pejabat Walikota 1942 (Feb-Sep)
8. a. Takahashi Ichiro Shi Tyo 1942 – 1945
9. Radjamin Nasution Asisten Shi Tyo 1942 – 1945

   Radjamin Nasution Walikota 1945 (Agust-Nov)
10. Mr. C. J. C. Becht Kep. Urusan Haminte 1945 (November)
11. Mr. Indrakoesoema Walikota 1945 (Desember)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Mr. Soerjadi Walikota 1946 – 1950
13. Doel Arnowo Walikota 1950 – 1952
14. Moestadjab Soemowidigdo Walikota 1952 – 1956
15. R. Istidjab Tjokrokoesoemo Walikota 1956 – 1958
16. Dr. R. Satrio Sastrodiredjo Walikota 1958 – 1964
17. Moerachman, SH Walikota 1964 – 1965
18. R. Soekotjo Walikota Kotamadya 1965 – 1974
19. HR Soeparno Walikotamadya 1974 – 1979
20. Drs. Moehadji Widjaja Walikotamadya 1979 – 1984
21. Dr. H. Poernomo Kasidi Walikotamadya 1984 – 1994
22. H. Sunarto Sumoprawiro Walikotamadya 1994 – 2000
23. H. Sunarto Sumoprawiro Walikota 2000 – 2002
24. Drs. Bambang Dwi Hartono Walikota 2002 – 2005
25. Drs. Bambang Dwi Hartono Walikota 2005 – 2010[2]

. Selama ini, sejak perubahan UU tentang otonomi daerah yang memberlakukan adanya pemilihan umum secara langsung untuk memilih kepala daerahnya sendiri, pada tahun 2000 Surabaya sudah melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak 3 kali yakni pemilu pada tahun 2000-2005 Surabaya dimenangkan dan dipimpin oleh pasangan H. Sunarto Sumoprawiro dan Drs. Bambang Dwi Hartono, Namun pada tahun 2002 terjadi perubahan kepemimpinan dikarenakan karena H. Sunarto Sumoprawiro dianggap tidak mampu lagi memerintah kota Surabaya karena

[2] Lihat di "Sejarah Walikota Surabaya", *http://surabayaraya.blogspot.com/2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kebijakan dan kesehatan yang terjadi pada dirinya[3]. Selanjutnya posisinya digantikan oleh Bambang DH.

Pada Pemilihan Umum selanjutnya tahun 2005 terjadi pemilu kembali dan dimenangkan oleh Bambang DH dan Arif Afandi. Dari pelajaran Pilwali ini, Bambang DH menjadi *trend setter* kota Surabaya sebab selama 2 kali dimenangkan oleh Bambang Dwi Hartono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan pada pemilu yang ketiga, tepatnya tanggal 2 Juni 2010 kota Surabaya diramaikan kembali dengan pesta pemilihan walikota 2010-2015. Tercatat 5 kontestan telah siap bertarung dalam arena politik diantaranya adalah : Pasangan urut no. 1 adalah Bagio Fandi Sutadi dan Mazlan Mansur, Pasangan no urut 2 Fandi Utomo dan Yulius Bustami. Pasangan urut 3 Arif Afandi dan Adies Kadir. Pasangan no urut 4 Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono, dan pasangan no urut 5 yakni Fitradjaja Purnama & Naen Soeryono.

Secara karakteristik masyarakat Kota Surabaya adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan-perbedaan dalam karakteristik masyarakat setidaknya memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik dalam memandang kriteria calon walikota dan wakil walikota sehingga calon yang maju nantinya juga akan pluralis dan majemuk. Artinya, pemimpin politik (walikota) Kota Surabaya bukanlah suatu entitas yang memiliki kesamaan-kesamaan pilihan politik dalam bentuk, sarana, metode, dan tujuannya. Perbedaan-perbedaan pilihan politik tidak terlepas dari adanya motif-motif

[3] Lihat Gatot Sudjipto, "Suara Parlemen" di *http://gatotsudjito.wordpress.com/2002/01/08/dprd-surabaya-gagal-putuskan-nasib-sunarto/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyertainya. Motif-motif inilah kemudian yang mendorong gerakan mahasiswa HMI dan KAMMI Kota Surabaya untuk melakukan partisipasi politik dengan memberikan kontribusi kriteria walikota yang dianggap tepat sebagai pemimpin Kota Surabaya.

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah kriteria walikota dan wakil walikota Kota Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan *Analisis Deskriptif dan analisis komparatif*, peneliti berusaha untuk menguraikan, menganalisa, membandingkan dan menjelaskan kriteria walikota dan wakil walikota Surabaya dalam perspektif gerakan Mahasiswa HMI dan KAMMI Daerah Surabaya sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan aktivis HMI dan KAMMI dalam masalah kepemimpinan politik.

E. Sumber Data

Informasi dan data tentang walikota dan wakil walikota di Kota Surabaya ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer,

Yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian[4]. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh organisasi yang menduduki jabatan penting baik di HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya.

---

[4] lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta ; Roesdakarya, 1997), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan yang dipilih adalah 3 aktivis HMI cabang Surabaya dan 3 aktivis KAMMI daerah Surabaya. Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah merepresentasikan karakteristik dari bentuk partisipasi dalam menjelaskan kriteria pemimipin politik kota Surabaya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak mendasarkan pada kuantitas informan.

2. Data Sekunder,

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis kriteria pemimpin politik kota Surabaya. Kerangka berpikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen, yakni:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan tetapi unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran masih dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. Dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variasivariasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut bertujuan untuk memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai pandangan informan dan memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa, situasi, dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menemui langsung informan dan subyek penelitian sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan. Wawancara ditujukan pada aktivis gerakan mahasiswa HMI dan KAMMI Daerah Surabaya. Adapun pedoman wawancara yang digunakan dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian photo. Pengamatan yang akan peneliti laksanakan adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi terjadinya peristiwa yakni Kota Surabaya yang meliputi gambaran lokasi, letak geografis, dan gambaran pemilu tahun 2010

3. Teknik dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data-data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan walikota dan wakil walikotaseperti KPU dan BPS Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun bisa melalui dokumen yang berupa buku, jumlah kontestan pemilu, dan data statistik kependudukan yang ada di KPU atau di internet.

G. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektifitas dalam penelitian ini atas dasar paradigma mikro (naturalistik) yaitu bahwa objektif yang dimaksud adalah realitas sebagaimana dipahami dan dihayati oleh subjek, bukan sembarang subjektif melainkan objektif menurut para subjek (*objectivied subjectivites*)[5].

Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektifitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber. Denzin dan Patton[6] menjelaskan tentang teknik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

H. Metode Analisis Data

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data menurut Moleong[7] adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan

---

[5] Moleong, *Ibid.*,171-173
[6] *Ibid.*, 178
[7] Ibid., 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh data. Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap sebagaimana versi Miles dan Huberman[8] yaitu:

a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan misal dari data-data artikel, buku, wawncara, rekaman dll. dengan menggunakan berbagai metode

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses redukasi data yang akan dilakukan peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan analisis. Menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara demikian harapannya kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

d. Penarikan Simpulan/Verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa data. Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

---

[8] Michael Miles dan Matthew B. Huberman,: *Analisis data Kualitatif : Buku sumber tentang metode- metode baru,* terj : Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta.; Ui Pres,1992) 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan keilmuan pada penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Persamaan Pandangan aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya tentang kriteria Walikota dan cawalikota Surabaya 2010-2015

Upaya membangun konsep kriteria pemimpin Surabaya memang tidak semudah seperti dalam membangun konsep kepemimpinan di daerah lain. Sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat kota yang plural dengan jumlah penduduk yang padat serta penuh realis dan idealis merupakan salah satu unsur penting dalam mengambarkan kondisi dan situasi Surabaya yang cukup genting dalam memandang masalah kepemimpinan politik. Oleh sebab itulah, masalah kepemimpinan, tidak hanya berbicara apa dan siapa yang memimpin. Tapi lebih dari itu, berbicara tentang latar belakang dan kriteria yang tepat dalam mencari sosok pemimpin kota surabaya ini.

Berkenaan dengan konsep kepemimpinan calon walikota dan calon wakil walikota (Cawali-Cawawali) Surabaya. Dua Organisasi Mahasiswa yang beridiologi Islam, HMI Cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya mengklarifikasikan kriteria pemimpin politik khususnya Cawali-Cawawali kota Surabaya periode 2010-2015 sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel.2 Perspektif aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya terhadap Kriteria Calon Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015

No	Aspek	Aktivis HMI	Aktivis KAMMI
1	Karakteristik Pemimpin		
	a. Kepribadian	Jujur, amanah, punya *sense of belonging*, berwibawa, dll	Tulus, jujur, amanah, kredibel, dll.
	b. Moral	Siap menang-kalah, bisa menjadi tauladan	Siap menang-kalah, integritas yang tinggi, bisa jadi tauladan.
	c. Agama	Islam	Islam
2	Motif kepemimpinan	harus berpihak pada rakyat kecil. Bukan hanya berkuasa dan memihak pemodal	harus dipahami untuk kemaslahatan bersama bukan motif semata-mata untuk berkuasa
3	Tugas kepemimpinan	Melayani, pelindung, mengayomi rakyatnya	Melayani, memberikan kenyamanan rakyatnya
4	Kompetensi/skill	Cerdas, bisa mengatur dan memimpin, serta punya kemampuan komunikasi	Berpengetahuan, bisa mengatur dan memimpin, serta punya daya enterpreneurship.
5	Kredibilitas	Punya pengalaman dalam hal kepemimpinan, kinerja bagus	Punya pengalaman memimpin. Bisa menyelesaikan masalah
6	Modal kepemimpinan	Massa, modal ekonomi, dan tidak munafik (ingkar janji).	Pengaruh, modal, tahu kondisi, punya daya dongkrak, dan wawasan dalam menyelesaikan masalah Surabaya.
7	Kinerja	Harus mementingkan rakyat kecil, bisa mnyerap aspirasi. Bisa membangun kota surbaya terutama dalam hal ciber city, penempatan PKL, pembangunan pasar tradisional, melestaraikan cagar budaya, mampu membangun karakter Surabaya, menjadikan Persebaya menjadi team sepak bola nasional.	Harus netral dari kepentingan, mampu memahami kebutuhan orang Surabaya baik asli maupun pendatang, mengatasi permasalah Surabaya, membangun ekonomi kecil dan perbaikan lingkungan, memperbaiki pemukiman pinggiran yang selama ini terabaikan, tepat visi & misi, mampu menjadikan Surabaya menjadi rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			kita smua, berpijak pada pembangunan jangka panjang.
8	Latar belakang		
	a. Pendidikan	Minimal Sarjana	Minimal sarjana
	b. Pekerjaan	Terserah	Terserah
	c. Kriminalitas	Tidak tersangkut kasus criminal seperti korupsi, pelanggaran hukum, tidak mengunakan money politik, dll	Tidak tersangkut kasus korupsi, perjudian, penodaan agama, tidak mengunakan money politik, dll
	d. Kesehatan	Sehat jasmani rohani	Sehat jasmani dan rohani
9	Tokoh Ideal	Rasulullah	Rasulullah
10	Calon favorit dari 5 Cawali-Cawawali Surabaya 2010-2015	Belum ada yang kualified. Di sisi lain secara emosional Mendukung Arif Afandi, namun juga menerima Risma-Bambang DH masih layak memimpin.	Belum ada yang kualified. Ada calon lain yang pantas. Di sisi lain secara emosional mendukung Fandi Utomo.
11	Komitmen	Harus Siap mundur jika gagal, memaksimalkan institusi kota, memberantas korupsi.	Menepati janji-janji politiknya, mereformasi birokrasi.
12	Harapan	Pemimpin yang jadi harus amanah, berani, tidak berpihak pada kapitalis. Menjadikan kota surabaya menjadi ciber city, penempatan PKL, pembangunan pasar tradisional, mau melestarikan cagar budaya, membangun karakter Surabaya, menjadikan Persebaya menjadi team sepak bola nasional.	Walikota yang terpilih benar-benar jujur, adil, dan merakyat,. Membangun Kota Surabaya menjadi aman, tentram, kota terbaik, dan pemimpin yang terpilih benar-benar menjalankan amanah dari rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memandang masalah kepemimpinan politik, aktivis HMI dan KAMMI mengartikan kepemimpinan dalam artian sebagai pelayan. Seperti apa yang dikatakan oleh Badri pemimpin adalah *qoirul ummah wa qodimul ummah.* Yang artinya sebaik baiknya manusia dan pelayan ummat. Badri menempatkan unsur terpenting pemimpin harus bisa melayani rakyatnya.[1] Sejalan dengan itu, Agus juga sependapat bahwa pemimpin adalah pelayan. Ia juga menjelaskan bahwa pekerjaan utama seorang pemimpin adalah melayani masyarakat.[2]

Di dalam teori kepemimpinan, kata "pelayan" dan "pemimpin" sering dianggap sebagai suatu yang berlawanan. Sebab selama ini justru muncul anggapan bahwa pemimpin justru dilayani. Dalam hal ini, Hector Ruiz menekankan bahwa inti tugas pemimpin adalah melayani. Bahkan Ruiz mengatakan pemimpin terbaik adalah pelayan terbaik[3]. Dan ini merupakan pendekatan terbaru yang menyusun paradigma akan kepemimpinan masa depan dimana sebelumnya kepemimpinan dipandang hanya bisa mengatur, mengarahkan, atau cuma memperdayakan sehingga seakan yang dipimpin hanya dipandang sebagai bawahan yang bisa diperdayai saja.

Pakar kepemimpinan Robert K. Grenlaf juga menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah pelayan yang artinya suatu kepemimpin yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dalam hati yang berkehendak untuk melayani yakni

---

[1] Badri al Amin, Anggota, Departemen Pelayanan Umat HMI cabang Surabaya, Wawancara, Wonocolo, 19/07/2010

[2] Agus Kusdianto, Ketua KAMMI Daerah Surabaya, Wawancara, Jemur Sari, 08/06/2010

[3] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Public, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: Refika Aditama,2009), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pihak yang melayani[4]. Ini artinya, motif yang seharusnya dipahami oleh para calon walikota yang maju dalam Pemilihan Walikota Surabaya ini adalah mengemban tugas melayani rakyatnya, bukan tujuan untuk berkuasa dan mendirikan dinasti dalam kepemerintahan atau bertujuan membesarkan partai melalui birokrasi kepemerintahan.

Sejalan dengan apa yang dikatakan aktivis HMI tentang motif pemimpin sekarang ini lebih kepada keinginan berkuasa daripada melayani masyarakatnya sehingga yang terjadi adalah pembentukan dinasti di birokrasi.[5] Dan juga aktivis KAMMI memandang kepemimpinan harus dipahami untuk kemaslahatan bersama bukan motif semata-mata untuk berkuasa[6].

Harus diakui bahwa pemimpin politik di era reformasi sekarang ini lebih mengarah kepada pragmatisme dalam berkuasa. Sesuai pendapatnya dosen sejarah Universitas Andalas Padang, Israr Iskandar bahwa Jika pemimpin masa lalu lahir dari rahim idealisme perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pemimpin sekarang umumnya lahir dari rahim zaman pragmatisme. Sebagian dari mereka, bahkan tipikal elit yang tidak satu kata dan perbuatan. Elit politik dalam sejarah kontemporer juga cenderung menonjolkan kepentingan sempit dan jangka pendek.[7] Tak heran, ketika para calon walikota

---

[4] M. Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 88 mengutip dari Donald Lantu, Erich Pesiwarisa , dkk dalam buku *servant leadership, the ultimate calling fulfill your life's Greatness*

[5] Nur Kholis, Ketua HMI Cabang Surabaya, Wawancara, Lap. Expo, 18/07/2010

[6] Faiz Khudlori, Ketua dept. Kebijakan Publik KAMDA, Unair, Wawancara ,11/06/2010

[7] Israr Iskandar, *Kepemimpinan Alternative*, Republika : Selasa, 08 Juli 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berteriak soal kepentingan rakyat dan negara, publik tidak serta merta percaya. Masalahnya tentu bukan pada persepsi publik yang cenderung apatis, tetapi justru pada kualifikasi dan kapabilitas pemimpin yang muncul. Belum terlihat indikasi kuat bakal tampilnya suatu kepemimpinan lokal yang punya kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, visi dan kredibilitas ysng bisa menjadi tauladan dan bisa menangani persoalan kota Surabaya yang serba kompleks. Lapisan pemimpin yang dominan sekarang adalah kelompok elit politik yang tidak memiliki kinerja dan track record yang meyakinkan dalam membela kepentingan rakyat kecil[8]. Fakta ini diperkuat dengan hasil pemilu tanggal 2 Juni 2010 kemarin, cuma sekitar 41,31% yang berpartisipasi dalam Pemilu Walikota Surabaya[9]. Artinya pemilu Surabaya secara normative adalah gagal. Sebab masyarakat sudah tidak respek terhadap pemilu walikota. Sikap apatis inilah yang menurut penulis beranggapan mengakibatkan stigma di masyarakat bahwa siapapun yang maju memimpin Surabaya tidak lebih sama saja. Hal ini menimbulkan perlunya calon walikota untuk instropeksi diri.

---

[8] sejalan dengan ini, di dalam tulisan Oksidelfa Yanto menulis tentang sifat apatis masyarakat yang timbul akibat melihat para pemimpin politik yang berkuasa selama ini ternyata tidak merealisasikan kepentingan rakyat setelah terpilih,justru mereka sibuk berebut kekuasaan dan lupa anspirasi rakyat. Lihat di Oksidelfa Yanto, "Menimbang Calon Pemimpin Nasional", Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1,(September 2003), 77-90

[9] Lihat hasil perolehan pilkada Surabaya sementara yang dilakukan LSI secara quick count di http://www.survei politik.com. Dalam hal ini, Kacung Marijan membagi fenomena golput dalam 5 hal yaitu, pertama, masyarakat sudah sejahtera sehingga tidak perlu ikut berpartisipasi dalam pemilu, kedua, dampak globalisasi akan adanya golput, ke tiga, menurunnya tingkat partisipasi karena jenuh akan performa pemerintah, ke empat, kepercayaan pada penguasa lama tanpa harus diganti, ke lima memilih atau tidak memilih sebagai hak privasi. Lihat, Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah* (Surabaya : Eureka & PuSDeHAM, 2006), 121-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam hal ini, aktivis HMI dan KAMMI, sama pendapat dalam memandang kriteria yang harus dimiliki kepemimpinan Surabaya yakni tidak memihak pada pemodal atau kaum kapitalis perkotaan terutama kalangan pemodal asing. Sebab menurut penulis, salah satu yang penyebab timbulnya sifat apatis dari masyarakat Surabaya adalah keterpihakan terhadap kelompok modal dan elit kota. Keterwalilan politik kota Surabaya yang lebih mengarah pada keterwakilan kapitalisme maupun korporasi ini tidal lepas dari kepentingan ekonomi[10]. Sebagai contoh sekarang ini pemerintah kota memperbesar APBD dengan menarik investor asing sehingga memperbanyak pembangunan market bahkan supermarket seperti Cito, Ciputra World phase I, Pakuwon Power Center, dan minimarket maupun supermarket lainya dalam kurun waktu 5 tahun ini. Hal ini sejalan dengan pengusuran pasar tradisional atas nama ketertiban semisal pasar padigiling, wonokromo lama, gembong, banyu urip, keputran, dan yang terbaru pasar buah paneleh yang ditempatkan di pojok kota adalah salah satu bentuk penyudutan terhadap usaha mikro masyarakat. Dengan berpindahnya pasar-pasar tradisonal ini jauh dari pusat kota memang positif dalam ketertiban kota namun di sisi lain pasar-pasar besar jelas diuntungkan sebab mereka bisa memonopoli kebutuhan warga yang tidak mungkin membeli di pasar yang lebih jauh. Selain itu pendirian market dimana-mana merupakan contoh dari arogansi penguasa yang kurang bijak.

[10]Secara Teoritis kekuatan korporasi maupun swasta sangat kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah sehinga yang muncul adalah bagaimana mengkapitalisme negara. Lihat Ramlan Subakti, memahami Ilmu politik (Jakarta: Grasindo, 2010), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria selanjutnya adalah masalah kompetensi dalam hal capasitas capabilitas, dan integritas calon pemimpin kota Surabaya. Aktivis HMI dan KAMMI daerah Surabaya menitik beratkan kemampuan memimpin sebagai sarat utama cawali-cawawali Surabaya. Hal ini tidak tidak bertentangan secara konsep teori kepemimpinan seperti halnya yang dijelaskan oleh akbar tanjung[11], dimana kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi yakni dengan segenap potensi dan kewenangan yang ada, mampu mampu memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk secara sadar dan sukarela berpartisipasi di dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengenai kinerja calon cawali-cawawali Surabaya, aktivis HMI dan KAMMI menitik beratkan kepada kinerja pembangunan kota Surabaya dari segala aspeknya. Lebih spesifik, Ridho menjelaskan tugas walikota dan wakil walikota kedepan harus mampu membangun kota Surabaya terutama membangun Surabaya menjadi *ciber city*, penempatan PKL secara layak, pembangunan pasar tradisional, melestaraikan cagar budaya, mampu membangun karakter Surabaya, menjadikan Persebaya menjadi team sepak bola nasional Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Srikit Syah[12] bahwa pekerjaan walikota Surabaya yang terpilih pada periode 2010-2015 adalah harus melakukan minimal 10 kebijakan diantaranya:

---

[11] Akbar Tanjung, "Kepemimpinan Politik Yang Negarawan" *(www.sesneg.go.id)*
[12] Srikit Syah, "Sepuluh Kebutuhan Warga Surabaya", Jum'at, Jawapos Edisi Selasa,26 /10/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Angkutan kota lebih nyaman dan aman,
b) dihentikannya pembangunan mal dan plaza, setidaknya dalam periode lima tahun,
c) diperbaikinya kondisi pasar-pasar tradisional,
d) gratis biaya sekolah minimal hingga SMP/9 tahun,
e) pembangunan pusat kesenian/kebudayaan,
f) kemudahan prosedur dan biaya ekspor agar neraca perdagangan positif,
g) diikuti penyerapan tenaga kerja yang positif pula,
h) peningkatan layanan kesehatan untuk warga kurang mampu,
i) perhatian pada golongan lansia,
j) peningkatan sarana jalan, perbaikan gorong-gorong, pencegahan banjir,
k) digalakkannya perolehan pajak yang disertai kejujuran petugas pajak

Mengenai pembangunan kota Surabaya sebagai *ciber city*, sebenarnya pemerintahan Bambang DH dan Arif Affandi sudah menjalankan progam ini sejak di cetuskanya visi kota Surabaya untuk tahun 2005-2010 yakni "*smart and care*" yang di dalamnya terdapat progam Surabaya sebagai *ciber city*[13]. Hal yang perlu diperhatikan juga menurut penulis adalah tentang pembangunan masalah moralitas dan mentalitas masyarakat kota Surabaya dalam hal pendidikan. Terutama masalah pendidikan bagi anak sekolah dimana masih banyak kasus

[13]Tjitjik Rahayu, "Perilaku Partai Politik Terhadap Isu Kebijakan Bidang Pendidikan di Surabaya" dalam *Administrasi Negara :Isu-Isu Kontemporer* (Yogjakarta : Graha Ilmu, 2009), 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelecehan seksual, pemerkosaan, membolos, serta membuat keributan dengan pawai kelulusan di jalan merupakan cermin kebrobrokan mental pendidikan di Surabaya. Masalah lain yang perlu ditata seperti upaya mencukupi kebutuhan air bersih dan menekan angka kriminalitas atau kecelakaan pemerataan masalah kesejahteraan. Sebab dari hasil penelitian pansus DPRD kota Surabaya dari 38 pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Jatim, Surabaya memiliki enam kelurahan termiskin[14]

Menyangkut masalah kriteria berdasarkan latar belakang semisal umur minimal 30 tahun, pendidikan harus minimal sarjana, latar belakang pekerjaan terserah, tidak tersangkut kriminalitas seperti korupsi, judi, dll. HMI dan KAMMI berpandangan sama. Kholis mengdentifikasikan umur berdasar sejarah kenabian Muhammad ketika berumur 40 tahun yang dianggapnya usia yang matang sedangkan Adi mengidentifikasikan umur minimal 30 berdasar tingkatan strata agar bisa dibedakan antara kriteria pemilihan anggota legeslatif yang lebih muda. Begitu juga pendidikan dimana cawali-cawawali harus minimal sarjana. Penulis memandang ini merupakan syarat yang penting. Sebab melihat bahwa Surabaya adalah masyarakat kota yang berpendidikan tentunya tidak salah jika pemimpin harus minimal sarjana. Terkait masalah latar belakang *track record* seorang cawali-cawawali Surabaya yang pernah tersandung korupsi, judi, perzinaan dan lain sebagainya. Menurut penulis, Ini terkait dengan stigma masyarakat akan latar belakang kepemimpinan. Dimana masyarakat kota yang

[14] Seputar Indonesia 1 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional dalam memilih secara tidak langsung memberikan kesan pembelajaran bahwa, syarat utama yang harus dipenuhi calon walikota adalah harus berlatarbelakang baik atau tidak tersangkut kriminalitas. Jika tidak, tentu jangan harap bisa dipilih baik sebelum atau sesudah memerintah. Sebab itu merupakan hukuman dari masyarakat yang sifatnya permanen.

Kriteria yang lain adalah masalah komitmen. Komitmen sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin politik sehingga ia seakan menjadi sumpah tersendiri akan melaksanakan janji-janji politiknya. Selama ini para elit mengunakan janji-janji manis hanya pada saat menjelang kampanye Pemilihan Walikota dengan menampakkan janji-janji yang mengiurkan. Seakan calon cawali-cawawali telah terkonstruksi masyarakat bahwa merekalah sang pahlawan yang akan menyelamatkan masyarakat dari hegemoni, ketidak adilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya berkuasa. Dalam hal ini menurut Mohammad Sobary[15] dalam politik pencitraan menyebut para calon yang demikian sebagai aktor salon yang pintar bermain gincu dan kecantikan. Karena itulah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh aktivis HMI dan KAMMI dalam memandang komitmen yang perlu dimiliki calon walikota dan wakil walikota terpilih menurut Adi[16] harus merealisiasikan janji

[15] Mohammad Sobary, "Pemimpin Kelas Salon", Kompas, 6 September 2008.
[16]Faizin Adi, anggota departemen Hubungan Masyarakat KAMMI, wawancara, Wonocolo, 18/07/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diucapkan selama kampaye, jika tidak mampu ditambahkan Ridho[17] lebih baik mundur.

Mengenai harapan kepemimpinan Surabaya ke depan, aktivis HMI dan KAMMI mengharapkan bahwa pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang benar-benar amanah, merakyat dan merealisasikan pembangunan kota Surabaya sehingga kota Surabaya menjadi kota terbaik. Sebenarnya, menurut penulis, harapan ini bisa terwujud jika walikota terpilih nanti mampu mewujudkan *good governace* yang didamba-dambakan rakyat dalam kepemerintahan Surabaya. Di dalam konsep *good governance,* pemimpin politik ketika terpilih harus benar-benar mampu merealisasikan amanat rakyat, minimal mampu menjalankan kepemerintahan dalam 3 hal[18] yakni; *pertama*, kepemerintahan politik, yakni proses pembuatan berbagai keputusan dan kebijakan harus berpihak pada rakyat bukan golongan semisal kebijakan penertiban PKL yang tepat arah, pengusuran pasar yang tidak merugikan, pembangunan jalan, ganti rugi, dll. Kepemerintahan politik ini mempunyai implikasi pada keadilan. *Kedua,* kepemerintahan ekonomi, yakni proses pembuatan keputusan memfasilitasi kegiatan ekonomi daerahnya dan interaksi penyelengara ekonomi. Kepemerintahan ekonomi memiliki dampak pada masalah pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan

---

[17]Aridlo Pamungkas, Wakil Bendahara Umum HMI, wawancara, Expo, 20/07/2010

[18]Sedarmayanti, *reformasi adminitrasi public*...,276 3 model *good governance* menurut UNDP (*United Nasional Development Progam*) bagi penulis sangat relevan dijadikan ukuran dalam kinerja kota Surabaya terutama dalam memperbaiki birokrasi agar lebih visioner.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas hidup masyarakat. Dan yang *ketiga* kepemerintahan adminstratif yakni mengacu pada system imlementasi kebijakan dengan pelayanan yang baik dimasyarakat sehingga dampak yang tampak adalah kualitas pelayanan prima pelayanan tidak berbelit belit, misal dalam pelayanan kesehatan, jasa transportasi, pengurusan surat-surat, KTP, Surat tanah, bangunan, dll sehingga masyarakat menjadi puas.

Sudut pandang aktivis HMI dan KAMMI dapat disimpulkan bahwa aktivis HMI maupun KAMMI daerah Surabaya menghendaki kepemimpinan berbasis transformasional[19] Hal ini dapat dilihat dari kriteria yang diberikan sangat erat dalam kaitanya dengan ciri ciri yang ada pada pola pemimpin transformasional seperti, kharisma (*idealized inffuence*) visi yang jelas dan menarik, optimis, inspirasi dan motivasi, kreatif dan inovatif, mampu menjadi contoh, memberikan kewenangan dan pembagian kerja pada orang lain dalam mencapai visi[20]

Oleh karena itu hal yang perlu dicatat pada tataran kepemimpinan politik ini, sebenarnya perlu adanya kecerdasan berpolitik (*Political Quotient*) atau biasa disingkat dengan PQ. Hal ini guna mengukur kemampuan *aqliyah* dan *nafsiyah* yang berhubungan dengan kapasitas, kapabilitas seorang pemimpin. Dimana dalam hal ini kecerdasan berpolitik berkenaan dengan kemampuan seorang untuk berfikir, bersikap dan bertindak dalam mengatur urusan

---

[19]French dan Raven, "Pemimpin Transformasional, Pemimpin Transaksional, dan Dorongan Inovasi" (Jurnal psikologi, 1996)102 lebih jelasnya telah disebutkan di bab II.
[20] Sedarmayanti, *Ibid*, 185-191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[21] Kecerdasan berpolitik ini dapat diperoleh jika pemimpin politik mampu mengabungkan dua dimensi antara kemampuan berpolitik dan kemampuan bertindak politik sehingga jika digambarkan dalam rumus adalah sebagai berikut.

$$PQ = PT + PA$$

Keterangan:

PQ *(Political Quotient)* : Kecerdasan Politik
PT *(Political Thingking)* : kemampuan berfikir politis
PA *(Political Attitude)* : kemampuan bertindak politis

Kemampuan inilah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memimpin Umat Islam khususnya dalam menegakkan daulah di Madinah. Bahkan Antonio Syafi'i[22] mengambarkan secara jelas bagaimana konsep kepemimpinan Muhammad dalam pengambungan gaya kepemimpinan dengan *multi bulding leadership*. Bahwa seorang pemimpin bukan hanya berkutat pada pemimpin politik semata, tetapi juga pemimpin religius. Artinya dengan kemampuan religius semua *system leadership* dapat digerakkan sehingga berjalan secara optimal.

[21] MD. Rian, *Political Quotient* (Bandung:Madani Prima, 2008), 91
[22] Antonio Syafi'I, *The Super Leader Super Manager* (Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007) bab II, 15-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Perbedaan Pandangan aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya tentang kriteria Walikota dan cawalikota Surabaya 2010-2015

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada perbedaan pandangan Aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya dalam memandang kriteria walikota dan calon walikota terutama dalam masalah gender, pandangan terhadap kriteria cawali-cawawali dalam UU otonomi daerah no 32 tahun 2004, jalur politik, dan mekanisme penyaringan calon walikota-wakil walikota Surabaya. Serta dukungan emosional calon cawali-cawawalikota Surabaya. Adapun perbedaan pandangan itu antara lain:

Tabel 2. Perbedaan Perspektif aktivis HMI cabang Surabaya dan KAMMI daerah Surabaya terhadap Kriteria Calon Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015.

no	Aspek	Aktivis HMI	Aktivis KAMMI
1	Jenis kelamin (gender)	Semua orang berhak menjadi pemimpin termasuk laki-laki, perempuan, banci, asalkan mampu memimpin	Lebih mengarah ke pemimpin laki-laki, Perempuan boleh memimpin namun ada batasan khusus.
2	Pandangan pada UU no. 32 thn. 2004 pasal 58-59	UU tentang 15% perlu di ubah menjadi agar lebih banyak calon yang bisa disaring.	UU nya sudah sesuai tinggal mekanismenya yang perlu diubah terutama dalam pengusungan calon walikota dari partai politik. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Jalur politik	Independen	Partai Politik
4	Mekanisme penyaringan calon walikota-cawawali Surabaya	Konvensi tokoh masyarakat melaui *fit and properties* di tiap daerah atau kecamatan	2 Konvensi di internal partai dan antar partai yang bergabung.

Menurut aktivis HMI Cabang Surabaya kriteria walikota dalam memandang kepemimpinan gender tidak begitu mempermasalahkan, Badri[23] mengatakan walau perempuan atau banci apapun baginya itu tak masalah. Yang penting kepekaan social dan solidaritas yang tinggi. Menurutnya pula, kata *kholifah* itu tidak dikhususkan pada salah satu jenis saja, tapi semua manusia entah itu Islam atau tidak ia menjadi pemimpin. Artinya siapapun bisa jadi pemimpin.

Mengenai pemimpin perempuan, Kholis dan Ridho mengataan bahwa perempuan boleh saja maju. Bahkan Ridho memandang bahwa kepemimpinan Surabaya ini relevan dipimpin perempuan, melihat bahwa dengan alasan bahwa selama ini Surabaya belum pernah dipimpin oleh walikota perempuan. Hal ini melihat bahwa sebagai contoh dinas kesehatan yang awalnya dipimpin oleh laki-laki dan sekarang justru maju ketika dipimpin oleh perempuan karena mampu mengcover progam kerja pengadaan puskesmas dalam tiap kelurahan. Juga masalah lokalisasi, perdaganga perempuan dan anak-anak, calon walikota perempuan lebih punya rasa empati daripada calon walikota laki-laki[24]. Hal ini

[23] Badri al Amin, wawancara, 19/07/2010
[24] Aridho Pamungkas, wawancara, 20/07/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan pandagan aktivis KAMMI yang lebih cenderung memilih kriteria laki laki daripada perempuan berdasar sudut pandang normative agama. Menurut Agus perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan sudah tidak ada lagi pemimpin laki-laki yang kompeten begitu juga dengan Faiz yang membolehkan perempuan jadi pemimpin asalkan tidak ada masalah di keluarganya.

Sebenarnya perdebatan masalah kepemimpinan perempuan merupakan perdebatan sejarah, terutama perdebatan paradigma ulama-ulama Islam dalam memandang konsep kepemimpinan ideal. Pendapat aktivis HMI cabang Surabaya bila di runtut sama pendapatnya pada ulama klasik Ibn Jarir At-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan[25] namun berbeda pendapatnya dalam masalh banci atau non muslim untuk menjadi pemimpin. Menurut Thobari, Penggambaran al-Qur'an terhadap perempuan jelas sekali menggambarkan berbagai citra positif. *Pertama*, perempuan adalah pribadi yang mempunyai kemandirian politik (*istiqlal al-siyasi*) seperti profil Ratu Balqis, yang disebutkan dalam Q.S. an-Naml ayat 23. *Kedua*, perempuan adalah manusia yang mempunyai kebebasan pribadi (*istiqlal al-syakhsyi*) seperti disebutkan dalam Q.S. at-Tahrim: 12. *Ketiga*, perempuan adalah pribadi yang bebas mengeluarkan pendapat di hadapan orang banyak. Legalitas kepemimpinan perempuan dalam teks Hadis antara lain mendasarkan pada Hadits, "Setiap kamu adalah pemimpin...".Nabi dalam hal ini jelas memberi ruang kepemimpinan kepada

[25] Ridwan, "Kepemimpinan politik perempuan dalam l;iteratur Islam Klasik", Jurnal Studi Gender STAIN Purwokerto,vol.3 no 1 edisii Januari-Juni 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah, Utsman RA.[26]

Di sisi lain, Apa yang dilontarkan Agus dalam memandang masalah kepemimpinan perempuan ini dipengaruhi oleh Fatwa jumhur ulama tentang tidak bolehnya wanita menjadi kepala Negara / pemimpin. Memang banyak dalil yang dikemukakan. Salah satu hadits yang sangat populer adalah: *"Lan yufliha qaumun wallaw amrahum imraatan"* (Tidak akan sukses (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita). Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Turmudzi. Dalam riwayatnya, Nabi SAW mengucapkan hal itu ketika mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan putri Kisra sebagai ratu mereka setelah Kisra meninggal dunia. Berdasarkan hadits itulah, maka seluruh imam madzhab Maliki, Hanafi, Syafii, Hambali plus pakar-pakar *fiqhus siyasah* yang tersohor, seperti Ibnu Khaldun, Al

[26] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Bandung : Mizan, 1996), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali, Al Mawardi, dan sebagainya, menyatakan, bahwa di antara syarat seorang diangkat sebagai kepala negara adalah "laki-laki"[27]. Hal ini semakin nyata dalam Islam terdapat perbedaan gender. Wanita dilarang menjadi imam shalat bagi laki-laki. Wanita tidak memiliki hak talak sebagaimana laki-laki. Wanita mendapat bagian berbeda dalam pembagian warisan Wanita Muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sementara laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahlil kitab. Kepala keluarga adalah laki-laki, bukan wanita, dan berbagai perbedaan dalam hak dan kewajiban lainnya.

Namun jika benar-benar meruntut pada pendapat Syaikh Yusuf Qordowi yang benar, Konsep imamah (kepemimpinan negara) dalam Islam memang berbeda dengan konsep kepemimpinan negara dalam sistem negara demokrasi. Karena itu, sebagian ulama modern, seperti Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa hadits tentang larangan bagi wanita untuk menjadi kepala negara, berlaku dalam system pemerintahan yang memberikan kekuasaan mutlak kepada sang kepala negara, seperti khilafah (*al imamah al udzma*), kerajaan, atau kekaisaran. Menurut Qardhawi, selain keimamahan dan kekhalifahan atau apa pun istilahnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka masalah ini masih diperselisihkan. Qordowi mencontohkan di dalam masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, apabila member kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementerian, perkantoran, atau DPR, tidak berarti bahwa mereka telah menyerahkan segala urusan mereka kepada wanita itu sepenuhnya dan membebankan tanggung jawab kepadanya

[27] Adian Husaini, "Lagi Soal Presiden Wanita", Republika Online, Sabtu, 17 Maret 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*wallaw amrahum*). Pada kenyataannya, tanggung jawab itu bersifat kolektif dan kekuasaan itu dijalankan bersama-sama oleh sejumlah orang di dalam lembaga-lembaga terkait, dan si wanita hanya memegang sebagian kekuasaan saja bersama yang lain.[28]

Artinya harusnya apa yang dikutip Agus akan pernyataan Yusuf Qordowi harusnya sedikit direvisi. Pernyataan yang sebenarnya menjelaskan bahwa pemimpin perempuan boleh maju asalkan tidak dalam kepemimpinan mutlak seperti halnya presiden, namun jika tataran local maka diperbolehkan.

Terlepas dari itu, pemimpin perempuan di kota Surabaya sangat langka. Terbukti saat maju dalam Pilwali (Pemilihan Walikota) hanya Risma dari golongan perempuan yang maju memimpin diantara 4 pasangan calon yang dari laki-laki. Ini membuktikan sebuah tatanan perubahan sejarah selama ini ,di Surabaya nanti jika menang. Sebab selama ini kepemimpinan Surabaya sudah berganti sebanyak 27 kali dan semuanya adalah laki-laki. Menurut penulis ini merupakan tantangan sendiri bagi Risma khususnya dalam mendongkrak budaya patriaki di kota Surabaya.

Dalam pandangan tentang UU no. 32 thn. 2004 pasal 58-59 tentang kriteria calon Walikota dan wakil Walikota, aktivis HMI dan KAMMI berbeda pendapat masalah layak atau tidaknya ayat yang tertuang di pasal ini. Menurut aktivis KAMMI, UU ini sudah layak tinggal implementasinya saja yang diubah. Berbeda dengan HMI Cabang Surabaya, Menurut Ridho pasal 59 ayat 2 tentang

[28] Yusuf Qardhawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer" terj. (GIP, 1995), 521-546

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan pasangan calon akan memenuhi persyaratan jika perolehan kursi di DPRD minimal 15% atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan, tidak bisa menyaring banyak calon pemimpin yang benar-benar kompeten. Ridho berpendapat kriteria yang mengharuskan 15% atau sekitar 7-8 kursi DPRD Surabaya yang berjumlah total 50 kursi, hendaknya diturunkan menjadi 10% atau cukup minimal 5 kursi di DPRD. Ridho berkeinginan agar semua calon yang sebenarnya lebih kompeten bisa disaring dan bisa ikut berpartisipasi dalam pencalonan Pilwali Surabaya yang selama ini di dominasi oleh partai.

Melihat hal ini, bagi penulis merupakan ide yang baru, sebab ini berhubungan dengan masih layak atau tidaknya UU ini dimana yang bisa merubah UU ini adalah legeslatif dari tingkat pusat terutama DPR pusat. Dan untuk prose usulan tersebut perlu adanya pertimbangan dari daerah apakah bisa diterima atau tidak. Kasus yang bisa digunakan sebagai contoh adalah di Jember dan Banyuwangi pernah terjadi kasus dimana ada 2 calon yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Padahal partai atau gabungan partai hanya boleh mengajukan satu pasangan calon. Akibatnya KPUD menjadi terganggu aktivitasnya dalam menghadapi teror pendukung dan putusan dualisme kepemimpinan tersebut. KUPD tetap berpegang pada UU dan menetapkan salah satu calon yang akhirnya sampai menimbulkan konflik hingga kantor KPUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi sempat disegel para pendukung calon yang gagal lolos.[29] Ketidak pahaman masyarakat akan UU Otonomi Daerah inilah yang mengakibatkan konflik bahkan kericuhan dimana-mana termasuk di Mojokerto akhir akhir ini. Seakan KPUD yang berwenang penuh dalam penentuan lolos tidaknya calon yang maju, padahal KPUD hanya menjalankan UU yang telah dibuat pemerintah. Memang dari fakta ini tidak salah jika untuk menghindari konflik ini perlu regulasi baru dalam proses pengusungan calon agar lebih banyak lagi, namun perlu ada pembatasan jumlah bagi calon yang maju.

Dalam jalur dan penyaringan calon walikota, HMI dan KAMMI Daerah Suarabaya berbeda pendapat. Seperti halnya Kholis merasa pesimis proses penjaringan dari partai politik yang terkesan tidak sterill dari kepentingan sehingga yang maju hanyalah calon kepentingan belaka. Senanda dengan itu Ridho agar calon yang menjadi walikota adalah orang yang benar-benar kompeten, Ridho lebih menitik beratkan penjaringan pemimpin melalui jaringan independen. Untuk calon independen, Ridho menawarkan konsep penjaringan dengan *fit and properties* di masyarakat yakni penjaringan tokoh-tokoh masyarakat di tiap masing masing daerah dipilih melalui musyawarah tingkat kelurahan sampai akhirnya di kecamatan atau antar kecamatan yang kemudian diseleksi melaui mekanisme *fit and properties* sehingga muncul satu atau dua calon yang siap di daftarkan ke KPUD dan dites kembali berdasar UU yang setelah itu dapat bersaing dengan calon dari partai. Ridho juga mengusulkan

[29] Muhammad Asfar, *Mendesain manajemen Pilkada* (Surabaya : Pustaka Eureka, 2006), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai local saja seperti di Aceh yang lebih bisa mengcover masyarakat Surabaya[30]. Di bawah ini merupakan gambaran skema proses penjaringan dari calon Independen menurut Ridho.

Skema.1. Proses Penjaringan calon walikota-walikota dari jalur Independen

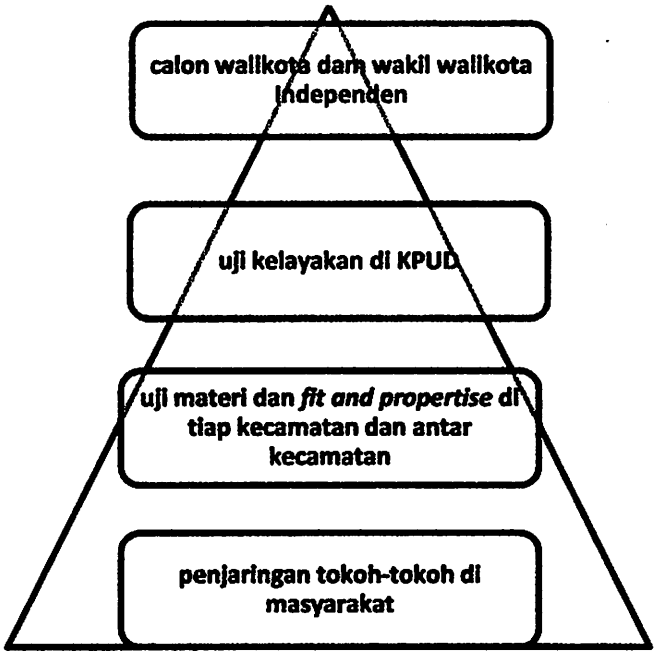

Berbeda dengan aktivis KAMMI cabang Surabaya yang lebih menitik beratkan penyaringan melalui partai politik. Seperti halnya Faiz mengatakan bahwa agar bisa mengendalikan demokrasi dan bisa menyaring calon walikota ini, maka perlu peran strategis partai politik. Tugas partai politik sebagai unsur terpenting dalam membentuk integritas kepemimpinan politik dalam mengusung walikota, sebab masyarakat tidak berfikir jauh pada masalah ini, tapi partai

[30] Aridlo, wawancara.., 20/07/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang berfikir jauh dalam memproduksi pemimpin politik. Untuk itu Partai politik yang harus mengkonsep mesin-mesin politiknya maupun permainan politiknya bermuara pada kemaslahatan bersama.[31] Karena itu sejalan dengan ini Adi menawarkan konsep penjaringan melalui konvensi partai politik yakni melalui proses seleksi di partai politik. Dimana system ini paling tepat diterapkan dikarenakan selama ini pemimpin yang jadi bukan asli karena kemampuannya dalam memimpin tapi dikarenakan pengaruh financial. Dalam ide Adi, Partai-partai menyiapkan masing-masing calon pemimpinnya melalui system konvensi di internal partai, lalu ketika terjadi pengabungan partai-partai baik partai besar atau partai kecil guna mengajukan calon sesuai syarat 15% minimal gabungan kursi partai diparlemen, antar partai poltik melakukan konvensi lagi sehingga memunculkan pemimpin yang benar-benar kompeten, bukan atas banyaknya kursi di DPRD atau financial belaka.[32] Untuk lebih ringkasnya, di bawah ini merupakan gambaran system konvensi gabungan partai politik dalam menjaring calon walikota dan wakil walikota menurut aktivis KAMMI.

[31] Faiz Khudlori, wawancara..,11/06/2010
[32] Faizin, wawancara.., 18/07/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema 2. Proses Penjaringan cawali-cawawali melaui jalur konvensi partai

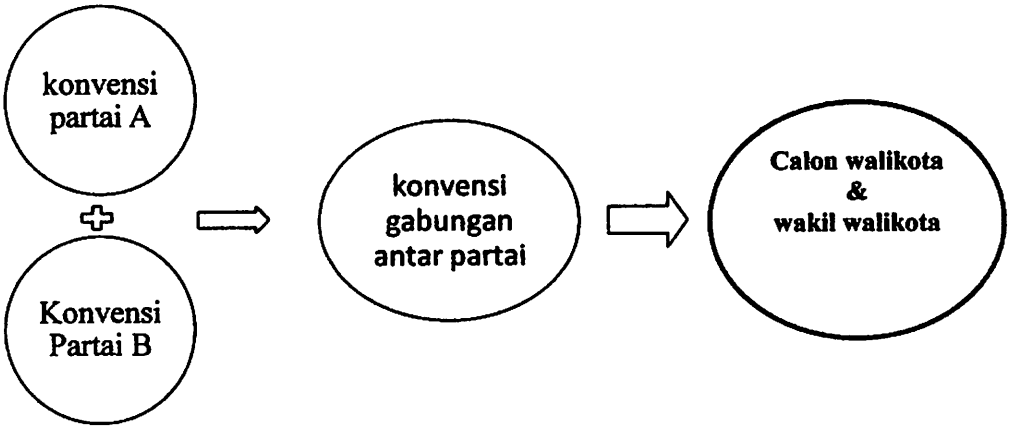

Melihat dua variabel ide yang berbeda ini, merupakan usulan yang menarik, sebab bisa menjadi sebuah rujukan dalam proses penentuan calon walikota dan wakil walikota Surabaya ke depan. Di mana krisis kepemimpinan bisa dimanajemen sedini mungkin agar kepemimpinan politik lokal benar-benar orang pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Persamaan pandangan antara aktivis HMI Cabang Surabaya dan KAMMI Daerah Surabaya dalam memandang kriteria Walikota dan Cawalikota adalah terletak pada cara pandang mereka dalam memahami pengertian dan tugas dari pemimpin khususnya Walikota dan Wakil Walikota yakni sebagai pelayan publik. Untuk menjadi pemimpin yang bisa melayani maka calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2010-2015 harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas dalam memimpin bukan berdasar atas manipulasi kepemimpinan, sehingga kepemimpinan yang muncul adalah model kepemimpinan transformasional.
2. Perbedaan pandangan antara aktivis HMI dan KAMMI terletak pada masalah gender, aktivis KAMMI lebih berdasar kepemimpinan patriarki. sedang aktivis HMI tidak mempermasalahkan kepemimpinan berbasis patriarki atau matriarki, dan juga masalah kriteria Walikota Pasal 58-59 yang ada pada UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, aktivis HMI menginginkan adanya perubahan terutama pasal yang menyangkut pengusungan Cawali-Cawawali 15% menjadi 10% kursi di DPRD, sedangkan aktivis KAMMI tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermasalahkan perubahan UU namun lebih pada implementasi yang ada di lapangan. Begitu juga dalam masalah penjaringan Calwali-Cawawali Kota Surabaya, aktivis HMI lebih cenderung melalui jalur independen dengan mekanisme penjaringan di masyarakat, sedangkan aktivis KAMMI lebih cenderung melalui konversi partai politik di internal partai dan antar partai yang bergabung.

B. Saran

Memang kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya sangat rumit digambarkan, apalagi menyangkut masyarakat kota yang penuh idealistis dan realistis dalam memandang calon pemimpin yang akan maju. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa orang yang ingin benar-benar maju dalam kontes kepemimpinan Kota Surabaya adalah orang-orang pilihan yang memiliki sedikitnya 5 modal diantaranya modal moral, politik, modal birokrasi, modal social, dan modal uang. Tanpa adanya modal tersebut tentu akan banyak mengalami kegagalan.

Selain itu hal yang perlu dimiliki oleh calon Walikota dan Cawalikota perlu adanya kecerdasan berpolitik dimana tidak hanya cerdas dalam berfikir politis namun juga cerdas dalam bertindak politis. Tentunya hal ini hanya bisa dicapai jika para pemimpin politik memiliki kemampuan intelektual profetik (pengabungan akal dengan wahyu) sehingga bisa menjadi tauladan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Qur'anul Karim dan terjemahannya, Bandung; Syamil Cipta Media, 2006

Abdul Haq, Fakir, *Bratakesawa, Kunci Swarga,II dan III,* Jogyakarta: Keluarga Bratakesawa, cet V, 1995

Alfian, M. Alfan, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta; gramedia Pustaka Utama, 2009

Asfar, Muhammad,. *Mendesain Manajemen Pilkada* Surabaya; Pustaka Eureka, 2006

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002

Jurdi, Fajlurrahman, *Aib Politik Islam* Jogyakarta; Antonylib, 2009

Kartono, Kartini, *pemimpin dan Kepemimpinan* Raja Grafindo Jakarta; Persada, 1994

Mascab, Mashuri, *Persoalan Otonomi Daerah: kepemimpinan kepala daerah dalam era otonomisasi yang luas-nyata dan bertanggungjawab*, Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 2006

Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Langsung*, Surabaya; Pustaka Eureka, 2006

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994

Moleong, lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Roesdakarya, 1997

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (terj) karya, GIP, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahayu, Tjitjik, "Perilaku Partai Politik Terhadap Isu Kebijakan Bidang Pendidikan di Surabaya" dalam *Administrasi Negara :Isu-Isu Kontemporer*, yogjakarta; Graha Ilmu, 2009

Rian, MD., *Political Quotient* Bandung:Madani Prima, 2008

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Public, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung; Refika Aditama, 2009

Shihab, Quraish, M., *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung; Mizan, 1996

Syafi'I, Antonio, *The Super Leader Super Manager*, Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007

Syamsudin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* Gramedia; Jakarta, 1993

B. Jurnal dan Internet

French dan Raven, *Pemimpin Transformasional, Pemimpin Transaksional, dan Dorongan Inovasi*, Jurnal psikologi, 1996

Hadi, *Gerakan Mahasiswa Sebagai Gerakan Pemberdayaan Dan Identitas*, di http://one.indoskripsi.com/node/7664, 13/01/2009

Husaini, Adian,. *Lagi Soal Presiden Wanita*, Republika Online, Sabtu, 17 Maret 2001

Iskandar, Israr *Kepemimpinan Alternative*, Republika : Selasa, 08 Juli 2008

Tanjung, Akbar., *Kepemimpinan Politik yang Negarawan* (sekertariat Negara Republik Indonesia) di www.setneg.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muasik, Kamal, *Budaya Politik Kampus; Studi terhadap aktivis mahasiswa dilingkungan universitas negeri semarang*, Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 2005

UU Otonomi Daerah (Focus Media:Bandung,2006

Michael dan Matthew B. Huberman, Miles,. *Analisis data Kualitatif : Buku sumber tentang metode- metode baru,* terj : Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta : Ui Pres.,1992

Yanto, Oksidelfa, *Menimbang Calon Pemimpin Nasional*, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, edisi bulan September 2003

Raharja, Sam'un Jaja, *problematika kepemimpinan satu paket:dari presiden sampai ke kepala daerah*, Harian Pikiran Rakyat, 22 Juni 2005

Ridwan, *"Kepemimpinan politik perempuan dalam literatur Islam Klasik"*, Jurnal Studi Gender STAIN Purwokerto,vol.3 no 1 edisii Januari-Juni 2008

Sudjipto, Gatot,. *suara parlemen di http://gatotsudjito.wordpress.com*

Sobary, Mohammad,. *Pemimpin Kelas Salon*, Kompas, 6 September 2008

Srikit Syah, *Sepuluh Kebutuhan Warga Surabaya*, Jum'at, Jawapos Edisi Selasa,26 /10/2010

Situs resmi Pemerintah Kota Surabaya, *www.surabaya.go.id*

Sejarah Walikota Surabaya, *http://surabayaraya.blogspot.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id